

**PENGELOLAAN SUMBER MARON SEBAGAI PEMENUHAN
KEBUTUHAN AIR DOMESTIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
MASYARAKAT KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Sosial***



Oleh

Alfiana Dwi Cahyani

NIM 125110802111001

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Alfiana Dwi Cahyani

NIM : 125110802111001

Program Studi : Antropologi

menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan saya, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan

Malang, 18 November 2016



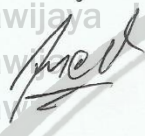
Alfiana Dwi Cahyani

NIM 125110802111001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Alfiana Dwi Cahyani telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 18 November 2016



Irsyad Martias, M. A

NIK. 201607 840709 1001



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Alfiana Dwi Cahyani telah disetujui oleh Dewan penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.



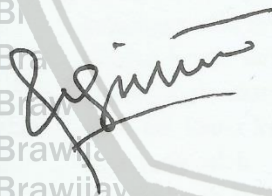
Manggala Ismanto, M. A., Ketua Dewan Penguji
NIP. 19880520 201504 1 003



Irsyad Martias, M. A., Anggota Dewan Penguji
NIK. 201607 840709 1001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi

Menyetujui,
Pembantu Dekan I FIB



Dr. Hipolitus K. Kewuel, M. Hum.
NIP. 19670803 200112 1 001



Syarifil Muttaqin, M. A.
NIP. 19731101 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Ridha yang telah diberikan Allah SWT dan shalawat beserta salam selalu dijunjung tinggi untuk Nabi Muhammad SAW. Selalu saya ucapkan *Alhamdulillah* karena Allah SWT yang selalu memberikan RahmatNya agar saya selalu ingat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun halangan dan rintangan selalu ada di depan. Skripsi ini dapat selesai berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dengan sepenuh hati saya haturkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada:

1. Spesial untuk seluruh keluarga Mbahkung Soedjono yakni, Sri Satiti Agustining Palupi a.k.a Tante Oesti Satiti dan Om Ari yang selalu asik aku ajak ngobrol pas aku lagi bingung. Riska juga selaku keponakan yang super bawel dan super cempreng.
2. Kedua orang tua saya, khususnya untuk ibu yang selalu tegar dan kuat mengurus ketiga anaknya yang “super”. Selalu sehat untuk anak-anakmu ya bu!
3. Bapak Irsyad Martias, M. A dan Ibu Edlin Dahniar A., M. A selaku dosen pembimbing yang super sabar menghadapi saya ketika proses bimbingan. Terima kasih telah memberikan masukan yang berarti untuk skripsi saya supaya lebih enak dibaca.
4. Jajaran dosen Antropologi, terkhusus Bapak Manggala Ismanto, M. A yang telah memberikan masukan yang cukup rinci sehingga saya dapat belajar untuk lebih detail lagi.
5. Masyarakat Karangsuco yang bersedia menerima saya dengan tangan terbuka. Ibu Anik, Pak Andis dan Ines satu keluarga kecil yang seringkali saya repoti saat penelitian berlangsung. Bapak Sayyid, Bapak Taufik, dan Bapak Zainuddin yang bersedia memberikan informasi dan membimbing saya dalam ketidak tahuan saya.
6. Keluarga Pak Agus Purnomo, Ibu Dewi dan khususnya Mbak Dwi Prareginawati yang selalu memberikan saya semangat. Rasanya seperti keluarga kedua saya.
7. Khusus kedua sahabat saya yang keduanya sudah menikah, Winda dan Nia. Biasanya sih aku harus selalu kebal dengan pertanyaan, mereka berdua aja udah lah kamu kapan? Sehat selalu untuk si kecil Muham, tumbuhlah jadi anak yang soleh.
8. Terima kasih kepada teman satu bimbingan yang emang satu satunya, Rifka Umaya Putri a.k.a Cici dan juga Rahmi Sendy yang satu kosan di Dewandaru 29, mereka selalu siap sedia menampung saya kalo lagi gabut dan tiada tujuan.
9. Temen seperjuangan waktu masih satu bimbingan yang sama, Rina, Sonya, Uci yang dulu kalo bimbingan selalu rame rame tapi sekarang kita berbeda beda tapi pasti kita bisa menghadapinya!

10. Teman berwirausaha, Calista Company: Chika, Mela, Bela, Faiz dan Zifa.
Semoga kita bisa berkumpul lagi buat bunder bunderin coklat dan mewujudkan mimpi kita bersama sewaktu dahulu.

11. Keluarga Besar Merpati Putih Universitas Brawijaya khusus saya ucapkan untuk: Abid, Deni, Resha, Pakpek cuma kita berlima yang angkatan 2012 dan semoga tahun ini kita semua sudah selesai dengan skripsi masing masing. Terus ada Reza, Ayu, Putri dan Vina kalian udah masuk ke penghujung semester jangan lupa dan jangan malas buat ngerjain skripsi pokoknya jangan ikutin senior kalian yang pada molor molor hehe. Angkatan 2014, Suci dan Niza jangan sampe ikut ikutan molor juga, jadilah mahasiswa yang rajin kuliah dan ngerjakan tugas hehe.

12. Teman teman satu perjuangan Antropologi angkatan 2012 yang satu persatu mulai sibuk cari kerja, tetap semangat! See you on top!

13. Terima kasih kepada seluruh teman, sahabat, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini tapi nama kalian selalu ada dalam hati saya.

Semoga apa yang telah mereka berikan baik berupa materi dan tenaga mendapatkan balasan dari Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Saya selaku penulis merasa bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Malang, 18 November 2016

Penulis,

Alfiana Dwi Cahyani

ABSTRAK

Cahyani, Alfiana Dwi. 2016. **Pengelolaan Sumber Maron sebagai Pemenuhan Kebutuhan Air Domestik serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Karangsuiko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang**. Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Irsyad Martias, M. A.

Kata Kunci: Air Bersih, Pengelolaan, PLTMH, Sumber Maron, Wisata

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu strategi pemerintah yang tertuang juga dalam gagasan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun yang sangat disayangkan adalah pengoptimalan sumber daya masih terbilang minim. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang juga melimpah, salah satunya adalah Sumber Maron. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketergantungan masyarakat terhadap Sumber Maron dalam konteks pemenuhan kebutuhan domestik serta pengelolaannya, dan tujuan lainnya yakni mendeskripsikan dampak pengelolaan Sumber Maron terhadap akses masyarakat Karangsuiko terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan Sumber Maron dikelola secara partisipatif oleh masyarakat yang terwujud pada Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSAB&S) Sumber Maron. Sumber Maron yang lebih dikenal sebagai objek wisata, fungsi utamanya sebagai sumber yang memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Karangsuiko. Potensi Sumber Maron kemudian dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan semenjak itu muncul potensi lainnya yakni pada sektor pariwisata. Seiring dengan perkembangannya Sumber Maron saat ini menjadi objek wisata dan memasuki babak baru yakni dalam mengatasi persoalan terkait dengan akses masyarakat terhadap kebutuhan air bersih yang nyatanya dirasa masyarakat sedikit terganggu.

ABSTRACT

Cahyani, Alfiana Dwi. 2016. **Management of Sumber Maron as Fulfillment Domestic Needs and Its Impact on Karangsono Society, Sub District of Malang**. Anthropology, Faculty of Culture Studies, Brawijaya University. Supervisor: Irsyad Martias, M. A.

Keywords: Water, Management, PLTMH, Sumber Maron, Tourism

The utilization of natural resources is one of the Government's strategy also contained in the idea of sustainable development. Indonesia is a country that has the potential of natural resources but unfortunately the optimisation still low. Sumber Maron is natural resources that very potential which is owned by Malang. This research aims to describe the dependence of community towards Sumber Maron in the context as fulfillment needs as well as its management, and other purpose is to describe the impact of management on community access related to the fulfillment need of water. In this research shows that the sustainability of Sumber Maron were managed by the community whom accomplished as Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSAB&S) Sumber Maron. Sumber Maron commonly known as tourism object, its main function as the natural resource which is fulfill the domestic needs the community. Its potential then developed into micro-hydro power plant (PLTMH) and since that time it appeared other potential in the tourism sector. Along with its development, Sumber Maron as a tourism object and entered a new phase in solving problem which is community access of water needs a little bit distracted.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Kerangka Teori.....	15
1.5.1 Ekologi.....	15
1.5.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	18
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	23
1.6.2 Pemilihan Informan.....	24
1.6.3 Pengumpulan Data.....	25
1.6.4 Analisis Data.....	27
1.7 Sistematika Penulisan.....	28
BAB II SETTING WILAYAH, BUDAYA, DAN MASYARAKAT.....	30
2.1 Letak Geografis Desa Karangsono.....	30
2.2 Aspek Demografi Desa Karangsono.....	33
2.3 Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat.....	34
2.3.1 Mata Pencaharian Penduduk.....	34
2.3.2 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.....	36
2.3.3 Organisasi Sosial.....	37
2.3.4 Pendidikan.....	40

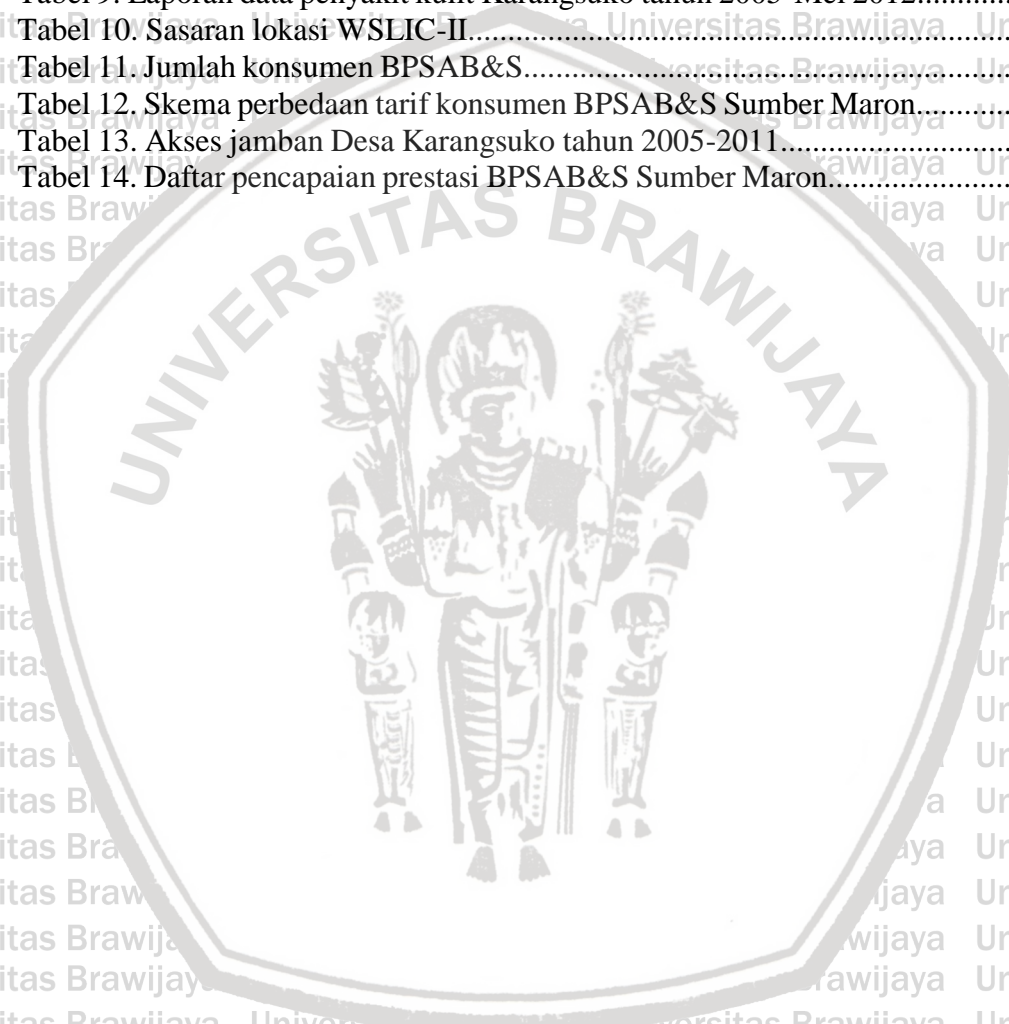
2.4 Potensi Sumber Daya Alam Desa Karangsono.....	41
2.5 Objek Wisata Sumber Maron.....	43
BAB III SUMBER MARON SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR DOMESTIK.....	47
3.1 Masyarakat Karangsono dan Air: Kebutuhan Pokok yang Belum Terpenuhi.....	47
3.1.1 Konsep Air Bersih Masyarakat Karangsono.....	51
3.2 Sumber Mata Air sebagai Pemenuhan Kebutuhan Air.....	55
3.3 Pasca WSLIC-II: Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSAB&S) Sumber Maron.....	63
BAB IV PENGELOLAAN SUMBER MARON: PLTMH, WISATA, DAN AKSES MASYARAKAT KARANGSONO.....	71
4.1 Keberlangsungan Sumber Maron sebagai Solusi Mengurangi Konflik Air Bersih.....	72
4.2 Pengembangan Sumber Maron: dari PLTMH menjadi Destinasi Wisata.....	75
4.3 Pengelolaan Wisata Sumber Maron.....	83
4.4 Pengembangan Wisata Sumber Maron sebagai Bentuk Dukungan Kepada Industri Kecil.....	86
4.5 Wisata Sumber Maron: Akses Masyarakat Terganggu.....	89
4.6 Pengoptimalan Sumber Mata Air.....	94
4.7 Refleksi Pelaksanaan Program WSLIC-II.....	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wisatawan saat musim libur.....	6
Gambar 2. Peta Desa Karangsono.....	33
Gambar 3. Website KIM Arkatif Karangsono.....	38
Gambar 4. Sumber Jeruk.....	41
Gambar 5. Sumber Taman.....	42
Gambar 6. Sumber Maron.....	45
Gambar 7. Bendungan Atas.....	45
Gambar 8. Monumen keberadaan program WSLIC-II.....	58
Gambar 9. Jamban umum dekat sungai.....	61
Gambar 10. Bendungan dan intake.....	77
Gambar 11. Tandon.....	78
Gambar 12. Bak penenang dan pipa pesat.....	80
Gambar 13. Wisatawan saat liburan tahun baru.....	81
Gambar 14. Sepeda air.....	81
Gambar 15. Warung makan dan sewa ban.....	82
Gambar 16. Jembatan penghubung jalan.....	85
Gambar 17. Rest area wisatawan Sumber Maron.....	87
Gambar 18. Plang “G Ada Tempat Sampah Kantongin Aja!”.....	98
Gambar 19. Sampah di kawasan wisata Sumber Maron.....	99
Gambar 20. Pembatas renang wisatawan.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar nama informan.....	25
Tabel 2. Pertumbuhan penduduk Desa Karangsono tahun 2010-2015.....	34
Tabel 3. Mata pencaharian Masyarakat Karangsono.....	35
Tabel 4. Agama yang dianut.....	36
Tabel 5. Uraian sumber daya sosial budaya masyarakat.....	37
Tabel 6. Uraian sumber daya manusia.....	40
Tabel 7. Uraian sumber daya alam.....	43
Tabel 8. Laporan data penyakit diare Karangsono tahun 2005-Mei 2012.....	34
Tabel 9. Laporan data penyakit kulit Karangsono tahun 2005-Mei 2012.....	34
Tabel 10. Sasaran lokasi WSLIC-II.....	57
Tabel 11. Jumlah konsumen BPSAB&S.....	62
Tabel 12. Skema perbedaan tarif konsumen BPSAB&S Sumber Maron.....	66
Tabel 13. Akses jamban Desa Karangsono tahun 2005-2011.....	67
Tabel 14. Daftar pencapaian prestasi BPSAB&S Sumber Maron.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *United Nations World Tourism Organization* (dalam Gunawan, 2012: 30) bahwa salah satu strategi pemerintah sesuai dengan rencana pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan pemanfaatan lingkungan.

Beberapa konsep yang digagas oleh pemerintah mengenai pariwisata dan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar terciptanya perspektif baru seperti hubungan antara pembangunan dan sumber daya alam yang tersedia. Selain itu juga meminimalisir terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh pembangunan (Abdurrahman, 2003: 15). Seperti pada konsep pembangunan berkelanjutan, salah satunya juga menyinggung persoalan pemanfaatan sumber daya yang digunakan sebagai salah satu aspek dalam usaha menumbuhkan perekonomian demi kepentingan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Sutamihardja dalam Askar Jaya, 2004: 3).

Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat pula digunakan untuk kepentingan ekonomi tanpa menyingkirkan tujuan awal dalam pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk kebutuhan seluruh manusia (*World Commission on Environment and Development*, 1988: 59).

Kebutuhan dalam gagasan tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat miskin dan juga gagasan mengenai keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan kini dan masa depan (*World Commission on Environment and Development*, 1988: 59). Melalui kedua pernyataan ini, diharapkan pemerintah

2
dapat menindaklanjuti pembangunan berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus mengurangi atau bahkan merusak ekosistem.

Pembahasan mengenai pemanfaatan lingkungan menjadi topik yang seringkali diulas dalam beberapa konferensi yang diselenggarakan oleh organisasi baik itu skala nasional maupun internasional. Salah satunya yang berhasil mengadakan konferensi skala internasional dan kemudian membawa hasil adalah organisasi pemerhati lingkungan yang terbentuk dalam *World Commission on Environment and Development*. Seminar dan konferensi tersebut membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan tata lingkungan. Lingkungan merupakan sektor yang perlu diperhatikan pada sebuah pembangunan. Karena dalam pembangunan setidaknya harus membuat pertimbangan khusus terhadap sektor lingkungan, bukan hanya memperhatikan pada satu sektor saja (*World Commission on Environment and Development*, 1988: xv).

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar (PGN, 2013: 3). Potensi ini baik untuk dikembangkan guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan pengembangan sumber daya alam tersebut. Kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab pemerintah, hal tersebut tertera pada pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak strategi yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, dalam lingkup yang lebih kecil lagi hal ini diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang. Seperti yang dilansir pada berita online di *beritajatim.com*, Eddy Rumpoko menegaskan bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang sangatlah besar dan jika dikelola dengan baik maka Kabupaten Malang dapat menjadi daerah yang maju dan lebih baik (Kiswara, 2015). Namun bukan hanya memiliki potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pokok, beberapa sumber daya alam juga memiliki potensi dalam sektor pariwisata. Selain dapat meningkatkan potensi daerah, potensi sumber daya alam ini juga kemudian dikembangkan menjadi objek pariwisata.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Made Arya Widhantara, berpendapat bahwa potensi objek wisata yang ada di tiga daerah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu harus dioptimalkan, mengingat jumlah wisatawan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu (Naiobe, 2014). Pengembangan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi wisata yang khususnya di Kabupaten Malang dan pengembangan pariwisata ini juga jelas mendorong peningkatan pada sektor ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Pitana dan Gayatri (2005: 3) bahwa pariwisata merupakan industri yang besar dan salah satu andalan dalam menghasilkan devisa. Pernyataan ini mempertegas bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan negara serta masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam ini salah satunya juga diterapkan pada sumber mata air di Desa Karangsudo. Potensi sumber mata air juga dikembangkan oleh pemerintah Desa Karangsudo yang melihat Sumber Maron dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kemudian pemerintah Desa Karangsudo mulai memanfaatkan Sumber Maron sebagai objek wisata pada tahun 2012. Sesuai dengan Instruksi Presiden RI (1969) mengenai pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk:

- a) *meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan negara dan masyarakat, perluasan kesempatan pada lapangan pekerjaan dan juga mendorong kegiatan industri sampingan masyarakat*
- b) *memperkenalkan dan memberdayakan keindahan alam di Indonesia*
- c) *meningkatkan persaudaraan atau persahabatan pada tingkat nasional dan internasional.*

Bukan hanya dikembangkan sebagai objek wisata, Sumber Maron adalah salah satu sumber daya alam yang dioptimalkan oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan mereka terhadap air bersih. Pengembangan potensi Sumber Maron sebagai sumber yang memenuhi kebutuhan air masyarakat juga tidak lepas dari bantuan pemerintah yang terwujud pada program WSLIC-II. Secara garis besar bantuan ini berasal dari pemerintah untuk membantu daerah yang pemanfaatan air bersih oleh masyarakat masih rendah, cakupan sanitasi dasar masih rendah, dan penyakit berbasis lingkungan di masyarakat masih tinggi (LP3ES, 2007: 5). Dalam konteks ini, Desa Karangsudo merupakan salah satu desa yang memiliki kriteria terkait dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sumber Maron diharapkan dapat memberantas permasalahan kekeringan yang terjadi. Bahkan setelah mengetahui Sumber Maron memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, bukan hanya menjadi sumber yang memenuhi kebutuhan air di Desa Karangsudo, namun masyarakat Desa Karangsudo juga

mengembangkan potensi tersebut untuk membangun PLTMH. Saat ini masyarakat Karangsono bukan hanya dapat mengatasi permasalahan kekeringan air, namun juga mandiri dalam persoalan energi (Irfan, 2015: 39). Keberlangsungan Sumber Maron terbilang berhasil karena sedikit banyaknya pencapaian ini akibat jerih payah yang dilakukan oleh TKM atau Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang kemudian saat ini menjadi Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSAB&S) Sumber Maron. Keberadaan badan pengelola ini berfungsi untuk menjaga aset WSLIC-II dari masa pembangunan hingga keberlanjutan program sampai saat ini.

Pengoptimalan potensi objek wisata terbilang berhasil dilihat dari kesiapan masyarakat terhadap pengembangan potensi objek wisata (Gunawan, 2011: 100). Bentuk dari kesiapan masyarakat terwujud dalam partisipasi masyarakat dalam mengelola objek wisata tersebut. Bagi masyarakat Karangsono, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan objek wisata Sumber Maron diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pendukung, seperti kamar mandi, musholla, lahan parkir, dan penyewaan ban. Selain itu dengan dibukanya wisata Sumber Maron tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa, hal ini dapat dilihat dengan dibukanya warung dan penyediaan kamar ganti. Untuk mendukung Sumber Maron sebagai objek wisata, jalan pun turut diperbaiki guna mempermudah akses wisatawan.

Pengembangan Sumber Maron menjadi objek wisata membawa dampak positif, namun pada kenyataannya pengembangan pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif khususnya bagi kehidupan masyarakat (Schipani, 2008: 55). Dalam konteks ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap

pengembangan Sumber Maron sebagai objek wisata menyebabkan akses masyarakat Karangsono akan sarana air bersih terganggu dan lingkungan menjadi tercemar akibat sampah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Anik (34 tahun)

“.....oh enggak pernah mbak kalau sampai airnya habis gitu. Cuma pernah ya waktu itu airnya mati mbak, mesinnya itu mati. Ya semenjak rame-rame ini mbak, ramainya kan baru sekitar 2 tahun belakangan ini. Gara-gara wisatawan katanya. Gak paham saya. Pokoknya waktu itu mesinnya sampe meledak katanya.”
(wawancara dengan Ibu Anik 09/05/2016)

Keluhan yang dirasakan oleh Ibu Anik juga dirasakan langsung oleh pihak badan pengelola. Beberapa kali badan pengelola mengeluhkan kerusakan mesin yang salah satunya disebabkan oleh pengunjung yang terlalu memadati bendungan bagian atas. Bahkan pada saat musim liburan, fenomena kerusakan mesin PLTMH merupakan hal yang biasa. Perlu diketahui sebelumnya, fungsi dari PLTMH ini adalah sebagai mesin penggerak guna mengangkat air menuju tandon yang kemudian didistribusikan menuju rumah warga.



Gambar 1: Wisatawan saat musim liburan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Keluhan lainnya yakni keberadaan sampah yang berserakan di sekitar kawasan wisata hingga mengalir sampai kepada Desa Brongkal dan hal ini yang dirasakan oleh Bapak Dafik (33 tahun). Sampah menyebabkan lingkungan sekitar nampak tidak terawat dan terkesan jorok, hal ini disebabkan oleh wisatawan yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Namun yang sangat disayangkan adalah

keberadaan tempat sampah yang berada di sekitar kawasan Sumber Maron masih minim, bahkan masih belum tersebar banyak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan awal di lapangan maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan masyarakat Desa Karangsono terhadap Sumber Maron dan ketergantungan masyarakat dalam konteks pemenuhan air bersih domestik?
2. Bagaimana dampak pengelolaan Sumber Maron terhadap akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan untuk

1. Mendeskripsikan pengelolaan masyarakat Desa Karangsono terhadap Sumber Maron dan ketergantungan masyarakat dalam konteks pemenuhan air bersih domestik
2. Mendeskripsikan dampak pengelolaan Sumber Maron terhadap akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, perlu adanya tinjauan pustaka guna referensi dalam penelitian dan menjadi pencarian celah sehingga tidak ada penelitian yang sifatnya menduplikat atau serupa. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Castetter dan Heisler (dalam Djunaedi 2000: 6) bahwa tinjauan pustaka diantaranya yakni untuk membantu memilih cara penelitian dengan belajar dari pengalaman penelitian

sebelumnya, untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi terdahulu dalam pencarian celah penelitian, dan untuk menghindari duplikasi sehingga dapat ditunjukkan bahwa penelitian tersebut belum pernah diteliti. Beberapa tinjauan pustaka dipilih oleh peneliti karena perlu adanya acuan untuk mencari celah dalam sebuah penelitian sehingga celah tersebut dapat dijadikan rumusan masalah peneliti selanjutnya.

Tinjauan pustaka pertama yakni topik yang diulas oleh Martias (2014) dalam tulisannya mengenai kelangkaan air di Gunung Kidul. Permasalahan yang diangkat oleh Martias pada masyarakat Gunung Kidul yakni terkait dengan wacana kelangkaan air yang sudah akrab dengan telinga masyarakat. Dikutip dari berita Sinar Harapan (dalam Martias, 2014) kelangkaan air ini disebabkan telaga yang semula dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari hari telah rusak dan tidak bisa digunakan. Sehingga dalam mencukupi kebutuhan air, seperti masyarakat Desa Karangasem perlu berjalan sekitar satu setengah jam menuju Luweng Jomblang (Martias, 2014).

Sesungguhnya terdapat potensi air yang terpendam yakni jaringan Sungai Bawah Tanah (SBT) Seropan dan Bribin dengan asumsi potensi SBT tersebut dapat menghidupi 1.000.000 jiwa menurut Haryono dan Yuwono (dalam Martias: 2014).

Kemudian untuk mengentaskan kesulitan yang dirasakan masyarakat GKKG (Gunung Kidul Karst Gunungsewu) kemudian dilaksanakan mega proyek oleh PDAM Dharma Tirta yang bekerja sama dengan KIT (Karlrusche Institute of Technology) Jerman untuk menginstall turbin bawah tanah dan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk pemasangan jaringan pipa primer (Martias, 2014).

Namun permasalahan mengenai pemanfaatan potensi SBT dijelaskan oleh Martias (2014) bahwa setelah potensi SBT dimanfaatkan, masyarakat masih merasa kesulitan mengakses air disebabkan oleh biaya operasional yang cukup mahal. Dalam konteks GKKG, PDAM hanya mendistribusikan ke wilayah tertentu maksudnya adalah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu dan yang bersedia membayar (Martias, 2014). Sedangkan kenyataannya masih banyak masyarakat yang tergolong rentan: janda tua, petani berlahan kecil, dan buruh tani yang selalu kesulitan mengakses air terutama pada musim kering (Martias, 2014).

Berbanding terbalik dengan catatan milik Martias (2014), tesis milik Emilia (2013) lebih membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam upaya untuk melakukan konservasi daerah aliran sungai (DAS) Bodri yang ada di Kabupaten Semarang. Jika topik Martias lebih mengulas kepada permasalahan kelangkaan air akibat pengelolaan air yang berubah fungsi menjadi sebuah komoditas, dalam tulisannya Emilia memfokuskan pada kajian *Community Based Natural Resources Management* (CBNRM) yang artinya masyarakat berpartisipasi penuh dalam mengelola sumber daya alam mereka (Emilia, 2013: 6). Pengelolaan secara partisipatif dilakukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia, sehingga manusia dapat memperoleh manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan (Emilia, 2013: 1).

Emilia (2013) menjelaskan secara lanjut pada praktiknya masyarakat Desa Keseneng berusaha menerapkan aspek CBNRM dalam pengelolaan sumber daya alam guna menjaga kelestarian lingkungan DAS Bodri dengan menggunakan fokus desa wisata. Maksud dari desa wisata yang diusung oleh masyarakat dan pemerintah Desa Keseneng adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya

alam yang dimiliki desa untuk dijadikan objek wisata (Emilia, 2013: 6).

Pemanfaatan objek wisata ini juga berdasarkan pada aspek CBNRM yang dipaparkan secara rinci oleh Kellert et all (dalam Emilia, 2013: 21) bahwa di dalam aspek tersebut terdapat keadilan (*equity*), pemberdayaan (*empowerment*), resolusi konflik (*conflict resolution*), pengetahuan dan kesadaran (*knowledge and awareness*), perlindungan keaneka ragaman hayati (*biodiversity protection*), dan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable utilization*).

Keberhasilan pengelolaan desa wisata ini dijelaskan oleh Emilia (2013) bahwa bukan hanya masyarakat yang berpartisipasi penuh terhadap pengelolaan, namun juga berdasarkan peran agen eksternal yang ikut berperan sebagai penyumbang konsep dan peredam konflik. Agen eksternal yang berperan yakni pemerintah Kabupaten Semarang khususnya pada Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, LSM Komunitas Salunding sebagai fasilitator, dan media massa sebagai pihak promosi (Emilia, 2013: 75). Emilia menjelaskan pula bahwa pada tahap implementasi untuk mempertahankan kelestarian, masyarakat telah berusaha untuk menutup tambang batu yang semula menjadi salah satu sumber pendapatan pribadi warga, menetapkan zona zona wisata, mengembangkan usaha alternatif di luar pertanian intensif, dan menerapkan sistem imbal jasa lingkungan (Emilia, 2013: 8).

Senada dengan penelitian milik Emilia (2013), tesis yang ditulis oleh Rahmawati (2007) menjadi rujukan selanjutnya untuk penulis. Rahmawati dalam tulisannya membahas mengenai pemanfaatan yang tepat bagi kawasan Senjoyo yang dalam hal ini adalah sumber mata air yang digunakan sebagai sumber air baku dan kawasan pengembangan pariwisata (Rahmawati, 2007: 4). Kawasan Senjoyo

meliputi kolam ritual, petilasan Joko Tingkir, bumi perkemahan, Embung Senjoyo, arena pacuan kuda, dan kolam pemandian atau renang khusus wisatawan.

Rahmawati menjelaskan terkait dengan kolam ritual, sumber mata air Senjoyo digunakan wisatawan untuk ritual *kungkum* pada hari tertentu seperti malam Selasa dan Jumat Kliwon, malam ke-21 bulan Ramadhan, dan malam 1 Syuro. Hal ini berawal mula dari keyakinan masyarakat setempat bahwa sumber mata air Senjoyo adalah tempat bertapa Joko Tingkir (Rahmawati, 2007: 3).

Faktanya dijelaskan oleh Rahmawati (2007) bahwa dalam RTRW Kabupaten Semarang kawasan Senjoyo merupakan salah satu kawasan yang difungsikan sebagai kawasan perlindungan resapan air dan perlindungan sekitar sumber mata air. Sejalan dengan itu, kawasan Senjoyo juga dijadikan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1 oleh pemerintah Kabupaten Semarang (Rahmawati, 2007: 4). Namun seperti yang dipaparkan kembali oleh Rahmawati bahwa dengan pengembangan dan pemanfaatan kawasan Senjoyo sebagai objek wisata berpotensi menimbulkan dampak. Secara lanjut Rahmawati menjelaskan bahwa dampak positif akibat dari pengembangan objek wisata yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat karena terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha. Namun di sisi lain dampak negatif juga dijelaskan oleh Rahmawati bahwa dengan pengembangan dan pemanfaatan menyebabkan penurunan salah satunya terjadi pada kondisi visual kawasan Senjoyo, penurunan debit air, dan banyak sedimentasi di Embung Senjoyo sehingga berpotensi banjir (Rahmawati, 2007: 4).

Seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati (2007) bahwa potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam dapat mendukung pembangunan. Selain dapat mendukung pembangunan potensi sumber daya alam dapat pula dimanfaatkan sebagai

pariwisata (Rahmawati, 2007: 2). Pada tahap pengembangan pariwisata, beberapa kendala dan dampak menjadi salah satu kajian utama dalam paradigma pariwisata.

Terkait dengan dampak, menurut Yang (2009: 77) pariwisata seringkali menimbulkan beberapa dampak khususnya pada kehidupan masyarakat. Senada dengan pendapat Yang (2009) dampak ini dikaji secara lanjut oleh Matsuoka dan Kelly (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *The Environmental, Economic, and Social Impacts of Resort Development and Tourism on Native Hawaiians*.

Penelitian Matsuoka dan Kelly dilakukan di Hawaii dengan objeknya terfokus pada masyarakat asli Hawaii.

Jurnal yang ditulis oleh Matsuoka dan Kelly secara garis besar menjelaskan mengenai dampak yang disebabkan oleh perkembangan pariwisata Hawaii yang selama kurun waktu 25 tahun belakangan ini membuat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat. Secara lanjut Matsuoka dan Kelly menjelaskan secara makro, apabila kembali pada abad 17 ketika para misionaris menguasai Hawaii hal tersebut yang kemudian berpengaruh pada lahan pertanian di Hawaii. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak misionaris yang memiliki hak akan tanah kemudian mereka mengkonversikan lahan pertanian menjadi lahan bisnis pariwisata (Matsuoka et all, 2015: 30).

Semula masyarakat Hawaii menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, mereka hidup secara subsisten sebelum akhirnya industri pariwisata datang ke dalam hidup mereka. Matsuoka dan Kelly menjelaskan pada segi ekologi, setelah datangnya pariwisata masyarakat kehilangan bahan makanan seperti ikan (pada masyarakat sekitar pantai) dan hasil pertanian seperti kacang dan kopi sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini disebabkan masyarakat Hawaii yang saat ini bergantung

pada sektor pariwisata dan lahan mereka saat ini banyak dialih fungsikan menjadi bangunan fasilitas pariwisata (Matsuoka et all, 2015: 32).

Permasalahan lainnya terjadi pada masyarakat Hawaii dalam segi ekonomi, setelah industri pariwisata datang kini peningkatan beban keuangan terjadi akibat sewa lahan yang semakin meningkat. Dalam penjelasan Matsuoka dan Kelly, masyarakat Hawaii kemudian terpaksa menjual lahan pertanian mereka dan diubah menjadi perumahan dan peningkatan fasilitas wisata. Masyarakat Hawaii dihadapi dengan keadaan yang sulit, pendapatan rumah tangga yang minim sedangkan biaya hidup meningkat. Hal ini disebabkan pada tahun 1970 ketika pariwisata di Hawaii sedang gencar, setiap 20\$ kenaikan gaji pegawai maka biaya hidup meningkat sebesar 30% (Matsuoka et all, 2015: 37)

Kemudian untuk mempersempit fokus kajian pustaka, jurnal yang ditulis oleh Darowski (et all 2006) menjadi rujukan peneliti dalam memperkaya bahan bacaan. Jurnal yang ditulis oleh Darowski menggambarkan mengenai dampak negatif yang terjadi kepada penduduk asli Hawaii akibat pembangunan pariwisata. Masih berkaitan dengan penelitian milik Matsuoka dan Kelly (2015) hanya saja Darowski lebih berfokus kepada dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan industri pariwisata pada masyarakat Hawaii.

Dalam analisis Darowski, globalisasi adalah salah satu penyebab dari terancannya keberadaan budaya asli masyarakat Hawaii dan bahasa lokal yang dimiliki oleh Hawaii. Selama bertahun tahun industri pariwisata di Hawaii terus berkembang namun pengembangan wisata ini menyebabkan perubahan pada pola hidup masyarakat dan mengancam keberlangsungan ekosistem di Hawaii (Darowski et all, 2006: 2). Dalam temuan Darowski, industri pariwisata

mengancam keberadaan flora dan fauna lokal karena lahan konservasi beralih fungsi menjadi fasilitas pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan data yang menyatakan bahwa sekitar 60% spesies flora dan fauna terancam punah (Darowski et al, 2006: 2).

Masyarakat Hawaii memiliki mata pencaharian yang sudah mereka yakini sudah ada semenjak nenek moyang mereka, namun semenjak industri pariwisata masuk ke dalam kehidupan mereka kini masyarakat Hawaii sangat bergantung dengan pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dalam hal ini masyarakat Hawaii sangat kesulitan untuk mempertahankan mata pencaharian asli mereka yakni memancing dan mengumpulkan obat serta makanan. Padahal di sisi lain pekerjaan dalam industri pariwisata bagi masyarakat Hawaii identik dengan upah yang rendah (Darowski et al, 2006: 6).

Pada sebuah tahap pengembangan atau pembangunan, pariwisata sebagai sebuah sektor yang mempunyai dimensi dan persepsi yang bervariasi (Wahab, 1992: 3). Berangkat pula dari pernyataan Yang (2009) yang menyatakan bahwa pada pengembangan pariwisata menyebabkan dampak khususnya pada kehidupan manusia. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rahmawati (2007), Matsuoka dan Kelly (2015), dan Darowski (2006) yang melihat bahwa dengan pengembangan pariwisata menyebabkan berbagai dampak baik itu bersifat positif dan negatif.

Potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai objek wisata saat ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah guna pengembangan wilayah.

Salah satunya yakni Sumber Maron, selain sebagai objek wisata memiliki fungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air masyarakat Karangsuiko. Bukan hanya

menghidupi air di Desa Karangsono saja, Sumber Maron juga mengalir air sampai ke 3 desa yakni Desa Panggungrejo, Desa Sukosari, dan Desa Gondanglegi Kulon.

Namun di sisi lain, meskipun sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan potensinya sebagai objek wisata perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan berupaya untuk mengkonservasi sumber daya supaya manusia mendapatkan manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan seperti yang dinyatakan oleh Emilia (2013). Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini ingin mengkaji dampak pengelolaan Sumber Maron terhadap akses masyarakat dengan air bersih. Selain itu pula penggambaran mengenai ketergantungan masyarakat Karangsono terhadap air juga menjadi kajian dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian sebaiknya perlu diadakan kerangka teori yang dapat mempertajam analisis dari pembahasan. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menganalisis pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih setelah berkembangnya Sumber Maron menjadi objek wisata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konsep ekologi dan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan sebagai acuan.

1.5.1 Ekologi

Konsep ekologi pertama kali diusulkan oleh biologawan bangsa Jerman Ernest Haeckel (Utina, 2009: 10). Konsep yang dikembangkan oleh Haeckel mengenai ekologi dituangkan pada definisinya mengenai ekologi yakni

“the comprehensive science of the relationship of the organism to the environment”

Definisi tersebut menyebutkan bahwa ekologi merupakan ilmu yang bersifat komprehensif dan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi organisme terhadap lingkungan. Pada definisi tersebut jelas sekali bahwa ekologi merupakan ilmu yang bersifat komprehensif, sehingga sifatnya bersifat menyeluruh. Bukan hanya berdasarkan ilmu biologi saja namun ruang lingkupnya bisa lebih luas lagi.

Hubungan interaksi yang dijelaskan pada definisi tersebut juga sangatlah penting mengingat sistem biologik yang terkecil, mulai dari molekul biologi yang paling rendah sampai kepada ekosistem karena hasil kajian mengenai interaksi inilah yang menghasilkan spesialisasi pada cabang cabang ilmu lain (Utina, 2009: 11). Kajian ekologi dalam perkembangannya kemudian menjadi disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu lainnya karena ruang lingkup yang cukup luas sebagai disiplin ilmu.

Setelah berkembangnya ekologi sebagai disiplin ilmu lingkungan, kemudian ekologi dijadikan payung konsep dari beberapa kajian ilmu tertentu. Terutama pada ilmu sosial, seperti sosiologi, psikologi, geografi dan salah satunya adalah antropologi. Pada antropologi, menurut Geertz (1983) ilmu ini juga memberikan sumbangsih terkait dengan antropologi yang mengkaji tentang manusia secara keseluruhan (holistik) termasuk interaksi manusia dengan lingkungannya.

Antropologi ekologi juga merupakan bagian dari kajian ilmu ekologi. Para ahli antropologi ekologi seperti Julian Steward lebih mengarah kepada paham fungsionalisme dan berfokus pada populasi dan ekosistem (Kottak, 2006: 41).

Pernyataan ini juga didukung oleh Geertz (1983) bahwa pada antropologi ekologi,

antropologi mengidentifikasi cara kebudayaan manusia dibentuk oleh kondisi lingkungan.

Namun seiring perkembangannya kini antropologi ekologi sudah mengarah kepada fokus yang lain, bukan hanya membicarakan mengenai permasalahan hubungan antara manusia dan lingkungannya, kini sudut pandang baru pada antropologi ekologi meliputi kebijakan, isu-isu degradasi lingkungan, krisis lingkungan dan keberlanjutan (Kottak, 2006: 42). Kini pembahasan dan permasalahannya menjadi lebih kompleks sehingga ranah antropologi ekologi menjadi luas.

Seperti pada pernyataan yang dikemukakan oleh Kattel (2005) pada perspektif antropologi ekologi yang membahas mengenai *sustainability* dapat didefinisikan sebagai bagaimana antara konsep *nature* dan *culture* memiliki hubungan satu sama lain. Hal ini digambarkan oleh Kattel seperti pada masyarakat Kumal di Bukit Arun-Nepal yang sangat menjaga kelestarian hutan milik mereka dan mereka juga meyakini bahwa dengan menjaga wilayah hutan mereka, mereka akan terhindar dari ancaman akan bencana. Dari masyarakat Kumal maka kita dapat belajar bahwa kepercayaan yang mereka anut secara tidak langsung juga menjaga kelestarian ekologi di dalamnya.

Analisis mendalam mengenai hubungan antara proses fisiologi¹ manusia dengan proses sosial dan budaya terletak pada bagaimana manusia memiliki ketergantungan terhadap lingkungan sekitarnya. Kattel (2005) mendefinisikannya secara sederhana bahwa ketergantungan itu dilihat dari bagaimana ancaman

¹ Yang dimaksudkan oleh Haeckel dalam Geertz (1983) yakni fenomena luar yang meliputi pembahasan mengenai hubungan manusia dengan dunia luar

manusia terhadap lingkungan berakibat kepada kehidupan manusia ke depannya (Kattel, 2005: 259). Ancaman manusia yang dimaksudkan oleh Kattel yakni manusia yang memperlakukan alam secara semena-mena dan pernyataan ini didukung pula oleh Serageldin (1996) bahwa kerusakan alam diakibatkan oleh eksploitasi dan kontaminasi tangan manusia (Serageldin, 1996: 50). Sebagai usaha dalam meminimalisir perilaku manusia yang dapat menyebabkan beberapa kerugian khususnya pada lingkungan, perlu adanya peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

1.5.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi topik pembicaraan yang cukup lama bagi para ahli. Istilah pembangunan berkelanjutan muncul ketika banyak para ahli yang berupaya untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang lebih cenderung berpengaruh banyak pada sektor ekonomi tanpa melihat dampaknya pada sektor sektor lainnya. Pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Dalam gagasan ini terdapat dua gagasan yang penting untuk diperhatikan yakni (*World Commission on Environment and Development*, 1988:59):

- a) *Gagasan kebutuhan, kebutuhan yang berarti kebutuhan esensial atau kebutuhan utama kaum miskin sedunia yang perlu diberikan prioritas utama*
- b) *Gagasan keterbatasan sumber daya baik itu teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang.*

Dalam dua gagasan tersebut ditekankan kembali pembangunan yang sebaiknya memperhatikan keterbatasan sumber daya sehingga tidak mengurangi kebutuhan generasi penerus di masa mendatang. Konsep keberlanjutan yang

digagas oleh *World Commision on Environment and Development* dapat menjadi payung dari berbagai konsep dan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan karena dalam konsep ini disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan esensial (sandang, pangan, rumah, pekerjaan) dan aspirasi manusia merupakan tujuan utama dari pembangunan (*World Commision on Environment and Development*, 1988:61)

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh WCED, mereka berpendapat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena isu lingkungan kini menjadi perhatian utama para ahli, bahkan perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan lingkungan guna menjaga keterbatasan sumber daya tersebut. Konsep tersebut berusaha mempertemukan aspek pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Sesuai dengan pernyataan dari Sutamihardja (dalam Askar Jaya, 2004:3) yang merumuskan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan:

- a) *Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas batas yang wajar dan mulai berusaha menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam*
- b) *Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem*
- c) *Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan*
- d) *Mempertahankan kesejahteraan masyarakat baik itu pada masa kini ataupun pada masa mendatang*
- e) *Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat dalam jangka panjang*
- f) *Menjaga mutu ataupun kualitas hidup manusia antar generasi*

Dalam penjelasan Sutamihardja (2004) mengenai pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada permasalahan pemanfaatan lingkungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebaiknya juga dipertimbangkan karena pembangunan berkelanjutan bukan hanya membicarakan persoalan pertumbuhan ekonomi saja namun juga memperhatikan pada permasalahan ekologi (dalam Askar Jaya, 2004: 4). Pada gagasan tersebut maka dibutuhkan menggali sumber daya

untuk memerangi kemiskinan serta mencegah terjadinya ketidak seimbangan fungsi ekologi, sehingga keduanya dapat berjalan seimbang (Jaya, 2004:3).

Keterkaitan antara pemanfaatan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan juga dijelaskan oleh Harris yang dirumuskan pada aspek pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari tiga yakni (2000:5-6) :

- a) *Aspek ekonomi* : diartikan sebagai pembangunan berkelanjutan haruslah mampu menghasilkan barang dan jasa secara keberlanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah, dan untuk menghindari ketidakseimbangan sektoral yang merusak produksi industri dan pertanian
- b) *Aspek lingkungan* : sistem yang berkelanjutan pada aspek lingkungan haruslah mempertahankan kestabilan sumber daya dan menghindari eksploitasi sumber daya. Hal ini ditujukan untuk pemeliharaan keaneka ragaman hayati, stabilitas atmosfer dan fungsi ekosistem lainnya.
- c) *Aspek sosial* : sistem yang berkelanjutan secara sosial haruslah mencapai keadilan distribusi memadai penyediaan pelayanan sosial salah satunya bidang kesehatan dan pendidikan.

Konsep ini berusaha menyelaraskan antara ketiga aspek penting yakni aspek ekonomi, lingkungan dan juga sosial. Selaras dengan pendapat Harris (2000), begitu juga Munasinghe (2003) yang merumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan haruslah sampai kepada tujuan akhir dari ketiga aspek tersebut (ekonomi, lingkungan dan ekologi). Tujuan ekonomi menekankan pada produksi barang dan jasa untuk memaksimalkan aliran pendapatan yang dapat dihasilkan sehingga dalam hal ini alokasi sumber daya dapat efisien. Kemudian pada tujuan ekologi menekankan pada kelangsungan hidup secara keseluruhan dan kesehatan ekologi hal ini dirumuskan untuk menghindari bencana kerusakan ekosistem. Pada tujuan sosial, penguatan nilai nilai sosial (norma dan perilaku) dan modal manusia (melalui pendidikan) maka akan meningkatkan modal sosial karena dengan melemahnya nilai sosial maka akan mengurangi ketahanan sistem sosial dan melemahnya sistem pemerintahan (Munasinghe, 2003: 9-10).

Sedangkan praktiknya di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam seakan masih nihil hasilnya. Hal ini yang diungkapkan oleh Abdurrahman (2003) bahwa meski pembangunan berkelanjutan sudah diletakkan sebagai sebuah kebijakan, kenyataannya justru dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tidak terkendali (Abdurrahman, 2003: 4). Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan harapan masyarakat Indonesia yang sudah tertuang pada undang undang terkait pengelolaan sumber daya alam bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat.

Kenyataannya saat ini kondisi sumber daya alam sedang mengalami kemerosotan secara kuantitas maupun kualitas. Secara lanjut dijelaskan oleh Serageldin (1996) khususnya pada sumber daya air, pasokan air yang dapat digunakan yang ada di bumi pada dasarnya terbatas. Permasalahan ini kemudian ditambah dengan fenomena populasi penduduk yang setiap tahunnya meningkat, dan kebutuhan akan air juga meningkat (Serageldin: 1996: 50). Sejalan dengan itu, Richter (2003) mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan air dan populasi penduduk saat ini kita sedang dihadapi tantangan untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan supaya meminimalisir kelangkaan sumber daya di generasi mendatang (Richter, 2003: 206). Sehingga dalam konteks ini pemerintah merupakan agen yang memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan kemakmuran masyarakat dan dapat mencukupi kebutuhan manusia secara keseluruhan (Richter, 2003: 222).

Pada pengelolaan sumber daya terdapat pula permasalahan yang menyebabkan dampak dan masyarakat adalah objek yang merasakannya. Perlu adanya konsep yang menaungi guna meminimalisir dampak yang terjadi. Konsep

ini yang akan menjadi acuan peneliti dalam melihat bagaimana penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang menitik beratkan pada keselarasan antara ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi analisis dalam pengelolaan Sumber Maron. Sehingga pada sebuah pengelolaan sumber daya alam bukan hanya melihat dampak pengelolaan pada satu sektor saja, namun juga melihat sektor-sektor lain seperti lingkungan secara khusus. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi sumber daya alam ataupun manusia tanpa mengurangi kebutuhan seluruh manusia terhadap sumber daya di masa mendatang. Sehingga dengan begitu konsep pembangunan berkelanjutan ini akan menjadi acuan dasar dalam menganalisis permasalahan pada penelitian dengan mengkaitkan pada data yang diperoleh.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dengan menggunakan metode ini penelitian berada pada kondisi yang alamiah serta mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam tanpa adanya intervensi dari peneliti (Herdiansyah, 2011: 8). Menurut Suyanto (2007), semenjak berkembangnya kualitatif sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian, kualitatif sebagai sebuah metode penelitian sudah terbiasa dengan metode partisipasi observasi, wawancara mendalam dan catatan pribadi (Suyanto dkk, 2007:166). Sehingga untuk antropologi khususnya sangatlah cocok untuk menggunakan metode kualitatif karena dengan begitu peneliti mendapatkan data yang mendalam.

Penelitian ini diawali pada bulan Januari 2016, observasi pertama dilakukan pada tanggal 23 Januari 2016. Observasi pertama peneliti sekedar mengamati lingkungan sekitar Sumber Maron. Pengamatan ini dilakukan supaya peneliti dapat

mengetahui sumber permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalah. Setelah observasi pertama selesai, dalam kurun waktu Januari hingga Februari peneliti menyusun proposal penelitian. Setelah proposal penelitian sudah disetujui dan dapat diseminarkan, peneliti menyusun surat izin penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan observasi kedua pada tanggal 9 Mei 2016.

Observasi kedua bertujuan untuk mengajukan izin kepada kepala Desa Karanguko untuk melakukan penelitian selama kurang lebih tiga minggu. Lalu proses pengumpulan data dimulai pada tanggal 15 Mei 2016 hingga 3 Juni 2016. Dalam rangka memudahkan peneliti dalam pengumpulan data, peneliti memutuskan untuk menetap di salah satu rumah penduduk Desa Karanguko.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Wisata Sumber Maron yang terletak di Desa Karanguko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan yang pertama karena sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang, pemerintah melakukan prioritas pengembangan infrastruktur di beberapa daerah yang salah satu perencanaannya adalah peningkatan sediaan air bersih (RPJMD, 2016: II-4). Sumber Maron adalah salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Karanguko. Sehingga dalam konteks ini, Desa Karanguko sudah menjadi desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap air.

Dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini sudah mulai banyak sumber mata air yang kini dikembangkan menjadi objek wisata guna mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan desa. Pengembangan ini salah satunya terjadi oleh Sumber Maron yang mulai ramai dikunjungi wisatawan pada

tahun 2012. Selain itu pula yang menjadi menarik adalah Sumber Maron merupakan wisata yang bukan hanya menyuguhkan panorama alam namun juga wisata dapat belajar proses pengelolaan air yang dilakukan oleh Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi dan juga pengelolaan air guna Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH).

Dengan melihat rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan penyediaan air bersih sedangkan di sisi lain banyak sumber mata air yang saat ini sedang dikembangkan menjadi objek wisata dan salah satunya pada Sumber Maron. Setelah berkembangnya Sumber Maron, pastilah terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat baik itu dalam segi positif dan negatif sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti.

1.6.2 Pemilihan Informan

Penentuan informan yang baik menurut Spradley (1997) setidaknya memiliki lima kriteria, yakni 1) enkulturasi penuh 2) keterlibatan langsung 3) suasana budaya yang tidak dikenal 4) waktu yang cukup 5) non-analitis. Maksud dari informan yang baik adalah informan yang memberikan wawasan baru kepada peneliti mengenai kebudayaan informan sekaligus juga belajar untuk terampil dalam melakukan wawancara (Spradley, 1997: 61).

Dalam usaha peneliti untuk memenuhi kriteria informan yang baik, peneliti mengkategorikan informan berdasarkan data yang ingin diperoleh dan sesuai dengan fokus yang ingin diteliti. Peneliti akan melakukan *purposive sampling* dengan melakukan wawancara kepada subjek tertentu. Wawancara dengan melakukan teknik *purposive* bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan seperti penelitian kuantitatif yang sifatnya menggeneralisasikan

informasi yang didapat. Dalam penjelasan Sugiyono (2011), penentuan informan yang dimaksudkan dalam teknik *purposive* tidak memiliki kriteria tertentu, namun informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:301-302).

Peneliti menentukan informan tidak bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian, sehingga subjek berupa informan yang memberikan informasi diperlukan selama penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kriteria informan yang baik menurut Spradley (1997), maka informan yang dipilih oleh peneliti juga berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga informan yang dipilih dapat memenuhi kriteria informan yang baik juga. Informan yang dipilih adalah informan yang memang ahli di bidangnya dan juga mengerti sehingga dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Peneliti menentukan informan sebagai berikut:

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Bapak Sayyid	Ketua BPSAB&S Sumber Maron
2.	Bapak Zainudin	Bagian Teknik Penyediaan Air Minum
3.	Bapak Taufiq	Guru
4.	Bapak Andis	KAUR Umum Desa Karangsono
5.	Bapak Dafik	Pengusaha Batu Bata
6.	Ibu Siti	Kader PHBS
7.	Ibu Anik	Ibu Rumah Tangga
8.	Ibu Nur	Ibu Rumah Tangga

Tabel 1: Daftar nama informan

1.6.3 Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mendapatkan informasi. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, setidaknya haruslah memiliki teknik dalam rangka mengumpulkan data untuk dijadikan sebuah informasi. Pada penelitian kualitatif memanglah tidak memiliki prosedur dan fleksibel karena pada saat sudah mengolah data, peneliti sewaktu waktu dapat kembali turun lapangan untuk mendapatkan tambahan informasi yang sekiranya dianggap perlu (Suyanto dkk, 2007:172). Dalam pengumpulan data, data bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder.

Data yang berasal dari sumber primer dapat berupa data yang dihasilkan melalui serangkaian wawancara dan data statistik yang jelas sumbernya, sedangkan untuk sumber sekunder data berasal dari studi literatur. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan serangkaian teknik mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan telaah dokumen (Suyanto dkk, 2007:186). Observasi merupakan tahap pertama dalam teknik pengumpulan data, observasi dilakukan dengan pengamatan awal terhadap situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara guna memperkuat asumsi hasil dari observasi. Tahap terakhir dalam teknik pengumpulan data adalah telaah dokumen, dokumen ini berupa gambar dan data pendukung yang dapat menjadi sumber sekunder penelitian.

Dalam praktiknya, pengumpulan data pada tahap observasi didapatkan oleh peneliti melalui pengamatan awal terhadap lokasi penelitian. Setelah melalui tahap pengamatan peneliti akan melakukan beberapa hipotesa awal mengenai keadaan sekitar lokasi penelitian. Setelah mendapatkan beberapa hipotesa, peneliti akan

melakukan wawancara dengan subjek terkait yang sebelumnya sudah ditentukan sebagai informan dengan berbagi pertimbangan tertentu (*purposive sampling*).

Setelah itu pada tahap terakhir peneliti akan melakukan telaah dokumen, dokumen ini berasal dari hipotesa awal dan wawancara yang dilakukan peneliti. Dokumen ini dapat berupa gambar dan audio hasil wawancara.

1.6.4 Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, data dilihat bukan sebagai informasi yang bersifat mentah namun data berasal dari informasi yang sudah diolah dan asalnya dari konstruksi makna si peneliti. Konstruksi ini merupakan hasil dari pencampuran data yang diperoleh serta nilai nilai, budaya dan bahasa si peneliti (Kuntjara, 2006:99).

Setelah peneliti melakukan serangkaian tahap pengumpulan data, mulai dari observasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk menguatkan hipotesa peneliti saat observasi setelah itu dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto dan audio rekaman saat wawancara.

Data yang didapat saat di lapangan tidak serta merta secara keseluruhan dituliskan dalam laporan penelitian, maka dari itu perlu adanya teknik analisis data yang tujuannya adalah mengungkapkan data yang sekiranya perlu dicari kembali, hipotesis yang perlu diuji, pertanyaan yang perlu dijawab, metode yang digunakan guna mendapatkan informasi, dan kesalahan yang sekiranya perlu diperbaiki (Usman dan Akbar, 2009:83).

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, analisis data pada penelitian kualitatif sifatnya terus menerus karena penelitian kualitatif tidak mengandalkan data berupa angka namun informasi yang bersifat deskriptif. Secara rinci dalam

penjelasan oleh Miles dan Huberman (1992) mendeskripsikan bahwa teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni :

- 1) Reduksi data : pada tahap ini reduksi data dimaksudkan sebagai suatu proses dimana peneliti melakukan proses pemilihan data. Reduksi bertujuan untuk memilah sehingga kesimpulannya nanti dapat diverifikasi dan bersifat valid
- 2) Penyajian data : penyajian data yang seringkali ditemukan pada penelitian kualitatif adalah bentuk teks narasi. Meski bentuknya selalu dalam teks narasi, namun peneliti sebelumnya memiliki bagan konsep yang mana bagan tersebut merupakan acuan hipotesa peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan.
- 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi data : memang dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan seharusnya bukanlah kegiatan yang final karena kegiatan ini bisa dilakukan setiap kali peneliti mendapatkan informasi saat penelitian. Penarikan kesimpulan ini dilakukan bisa setiap waktu namun pengolahan data diperlukan supaya kesimpulan tersebut bersifat valid dan dapat diuji kebenarannya. Sehingga data dapat terverifikasi dan makna yang terkandung di dalam data juga terbaca.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dimulai dengan Bab I yang berisi mengenai latar belakang peneliti memilih permasalahan, kemudian secara lanjut dituangkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin diraih. Serangkaian penjelasan mengenai kajian pustaka yang dipilih peneliti, untuk mencari celah dalam sebuah penelitian dan kerangka teori yang digunakan sebagai

analisa. Pemaparan mengenai metode penelitian meliputi pemilihan lokasi penelitian, pemilihan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Dalam penulisan Bab II peneliti berusaha menguraikan secara rinci mengenai lokasi penelitian yang dipilih meliputi keadaan geografis wilayah Karangsono dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemudian masuk pada Bab III yang konten di dalamnya berupa temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian. Temuan lapangan pada Bab III sebagian besar membahas mengenai ketergantungan masyarakat terhadap Sumber Maron dalam konteks pemenuhan kebutuhan air. Penjabaran ini berupa penggambaran masyarakat Karangsono yang kebutuhan akan air belum terpenuhi dan berkaitan dengan masalah kesehatan.

Kemudian penjabaran dilanjutkan dengan datang bantuan yang berasal dari pemerintah dan pada akhirnya solusi akan pemenuhan kebutuhan air dapat terselesaikan.

Selanjutnya dibahas pada Bab IV berisi mengenai analisis yang mengaitkan antara kerangka teori dengan temuan lapangan yang ada. Analisis ini berupa penjabaran mengenai dampak pengelolaan Sumber Maron terkait dengan akses masyarakat Karangsono terhadap air bersih. Kemudian pada Bab V yakni sebagai penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa penjabaran singkat mengenai hasil dari keseluruhan temuan lapangan dan pada subbab saran diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti, akademisi dan pemerintah khususnya.

BAB II

SETTING WILAYAH, BUDAYA DAN MASYARAKAT

Pemilihan lokasi penelitian pada sebuah penelitian ilmiah merupakan salah satu unsur penting. Pemilihan lokasi bisa terjadi karena beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat pula berupa kesesuaian tema yang akan diteliti atau mungkin karena lokasi penelitian tersebut menarik untuk dikaji sehingga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sendiri letaknya berada di Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan difokuskan pada situs pariwisata Sumber Maron.

Peneliti memilih Sumber Maron sebagai lokasi penelitian karena Sumber Maron merupakan sumber mata air yang saat ini menjadi wisata yang cukup populer dan di sisi lain Sumber Maron merupakan satu satunya sumber yang menghidupi masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air.

Dalam bab ini peneliti berusaha mendeskripsikan sekilas mengenai lokasi penelitian. Deskripsi ini termasuk kondisi geografis, kehidupan masyarakat Karangsono baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Kemudian tidak lupa pula pembahasan mengenai situs pariwisata yang ada di Desa Karangsono yang dikaji oleh peneliti yakni wisata Sumber Maron.

2.1 Letak Geografis Desa Karangsono

Desa Karangsono merupakan salah satu dari 10 desa yang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecamatan Pagelaran sendiri masih terbilang baru karena sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Gondanglegi yang akhirnya melakukan pemekaran sekitar tahun 1999 (Sejarah Kecamatan Pagelaran dapat dilihat di

http://pagelaran.malangkab.go.id/?page_id=217). Kemudian setelah melakukan pemekeraan, Kecamatan Pagelaran memiliki 10 desa meliputi Desa Pagelaran, Desa Banjarejo, Desa Brongkal, Desa Kanigoro, Desa Kademangan, Desa Sidorejo, Desa Suwaru, Desa Clumprit, Desa Balarjo dan Desa Karangsudo.

Berdasarkan penjelasan pada data Desa Karangsudo tahun 2012, jarak Desa Karangsudo dengan pusat Kabupaten yakni Kepanjen adalah ± 5 km apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 15 menit perjalanan. Apabila menuju pusat kota yakni Kota Malang, jarak Desa Karangsudo menuju pusat kota ± 28 km dengan perjalanan yang ditempuh sekitar 1 jam (Data Desa Karangsudo tahun 2012). Jika ingin menuju Desa Karangsudo bisa melalui beberapa jalur, apabila melewati Kepanjen ataupun melalui Kendalpayak maka akan melewati Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi. Hal ini karena Desa Karangsudo berbatasan langsung dengan Desa Sukorejo pada bagian utara. Apabila ingin menuju Desa Karangsudo melalui Kecamatan Gondanglegi maka akan melewati Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran karena dua desa ini letaknya berdekatan. Akses menuju Desa Karangsudo memang harus masuk melewati gang setelah jalan utama, untuk lebih mudahnya apabila melihat pintu masuk menuju Sumber Maron atau Sumber Taman maka disitulah letak Desa Karangsudo. Berikut merupakan penjelasan mengenai batas-batas wilayah Desa Karangsudo menurut data desa tahun 2012:

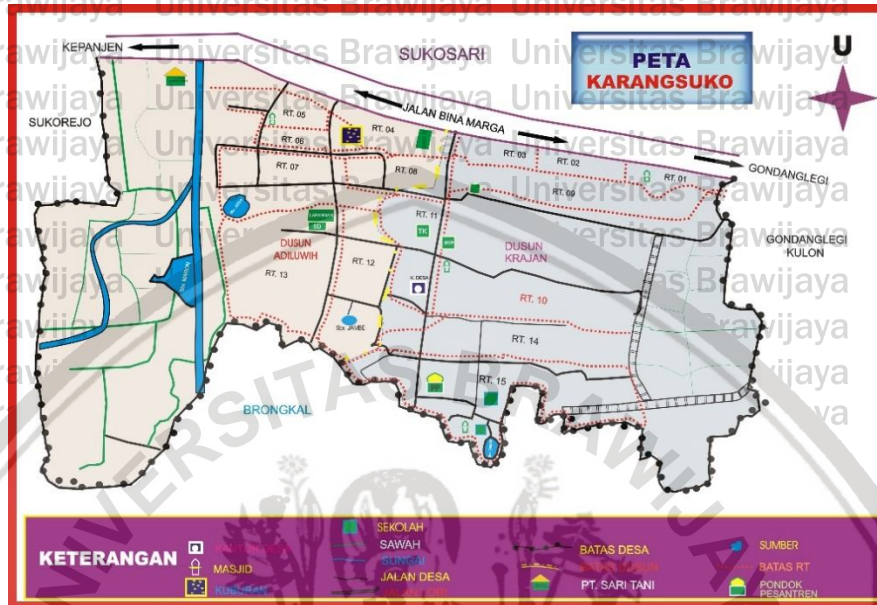
- a) Sebelah Utara : Desa Sukosari Kec. Gondanglegi
- b) Sebelah Timur : Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi
- c) Sebelah Selatan : Desa Brongkal Kec. Pagelaran
- d) Sebelah Barat : Desa Sukorejo Kec. Gondanglegi

Sebagai salah satu desa yang berada pada wilayah Kecamatan Pagelaran, secara topografi letak seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagelaran tidak jauh berbeda. Secara garis besar Kecamatan Pagelaran termasuk pada wilayah yang berkontur datar (lihat RPJMD Kabupaten Malang hal. II-2), serupa dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Begitu pula Desa Karangsudo yang menjadi salah satu bagian dari Kecamatan Pagelaran yang berada di ketinggian $\pm 50-350$ meter di atas permukaan laut (Data Desa Karangsudo tahun 2015). Sesuai dengan data desa maka terbukti bahwa Desa Karangsudo termasuk pada desa yang berada di dataran rendah.

Seperti wilayah dataran rendah pada umumnya, keberadaan desa yang terletak pada dataran rendah terlihat dari hamparan sawah dan kebun tebu yang berada di sepanjang jalan dari Gondanglegi menuju arah Desa Karangsudo. Hamparan sawah dan kebun tebu dalam hal ini nampak merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat desa yang berada di kawasan dataran rendah.

Hamparan sawah dan kebun tebu seakan mempertegas bahwa Karangsudo termasuk pada wilayah dataran rendah, selain itu pula terlihat dari cuaca pada siang hari. Selama penelitian ini berlangsung cuaca Karangsudo terbilang panas dan terik di siang hari. Namun jika sudah memasuki musim hujan saat menjelang sore pemandangan akan hujan lebat disertai petir yang menyambar merupakan hal yang biasa bagi masyarakat. Bukan hanya biasa dengan hujan dan petir yang menyambar, bahkan menurut penjelasan Ibu Anik (34 tahun), beberapa rumah warga pernah sampai tersambar petir dan menyebabkan barang elektronik seperti televisi dan komputer rusak.

Secara administratif masyarakat Desa Karangsudo tersebar di dua dusun yakni dusun Adiluwih dan dusun Krajan dengan pusat pemerintahannya berada di Dusun Krajan RT.11 RW.03. Berikut adalah gambar peta Desa Karangsudo:



Gambar 2: Peta Desa Karangsudo

Sumber: Data Desa Karangsudo tahun 2015

Luas wilayah Desa Karangsudo menurut data desa tahun 2012 yakni 399 Ha dengan beberapa pembagian wilayah untuk fasilitas umum seperti masjid, sekolah, kemudian pemukiman penduduk, kegiatan ekonomi, perkebunan, dan lain sebagainya. Penggunaan wilayah pada Desa Karangsudo sebagian besar digunakan sebagai tanah sawah dengan luas 360 Ha. Hal ini disebabkan sifat tanah yang dimiliki oleh Desa Karangsudo sebagian besar adalah berwarna hitam sehingga cocok untuk dijadikan lahan perkebunan dan juga pertanian.

2.2 Aspek Demografi Desa Karangsudo

Secara garis besar Desa Karangsudo terbagi menjadi 2 dusun yakni Dusun Krajan dan Dusun Adiluwih. Kedua dusun ini mayoritas penduduknya berasal dari Suku Madura dan Suku Jawa. Berdasarkan data desa tahun 2012, secara rinci

keseluruhan jumlah penduduk yang berasal dari Suku Jawa adalah 2.944 jiwa dan jumlah penduduk yang berasal dari Suku Madura adalah 2.842 jiwa. Berikut adalah tabel pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2015:

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah	km ²	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Jumlah Penduduk	jiwa	5.382	5.463	5.539	5.609	5.659	5.669
Jumlah Laki-Laki	jiwa	2.529	2.567	2.603	2.633	2.674	2.685
Jumlah Perempuan	jiwa	2.853	2.896	2.936	2.976	2.985	2.984
Jumlah A-RTM	orang	353	345	321	310	294	294
Pertumbuhan Penduduk	%	1,50	1,39	1,26	1,15	0,88	0,22
Kelahiran Penduduk	jiwa	81	76	70	65	50	35
Kematian Penduduk	jiwa	21	19	15	12	18	23
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	369	445	521	586	636	655

Tabel 2 : Pertumbuhan Penduduk Desa Karangsuiko tahun 2010-2015

Data: Sekretariat Desa Karangsuiko tahun 2015

2.3 Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat

2.3.1 Mata Pencaharian Penduduk

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Karangsuiko termasuk pada kawasan dataran rendah. Sesuai dengan data desa tahun 2012 yang secara rinci menyebutkan bahwa dari 399 Ha luas desa, sekitar 360 Ha adalah tanah yang digunakan untuk aktivitas pertanian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tiang penyangga ekonomi masyarakat Karangsuiko berada pada sektor pertanian. Apabila diakumulasikan jumlah keseluruhan masyarakat Karangsuiko sekitar kurang lebih 80% bekerja sebagai petani. Seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	3.055	3.061	3.068	3.075	3.080
Bangunan&Pertukangan	130	139	150	156	175
Perdagangan	61	69	75	83	89
PNS	15	16	19	20	22
TNI/POLRI	2	2	2	2	2
Karyawan Swasta	70	75	80	89	95
Pensiunan	0	2	3	5	7
Jasa/Lainnya	25	30	44	47	52

Tabel 3: Mata Pencapaian Masyarakat Karangsono

Sumber: *Sekretariat Desa Karangsono tahun 2014*

Masyarakat memanfaatkan lahannya untuk menanam cabai, bawang merah, kacang panjang, kubis, dan tentunya padi yang dijadikan andalan utama pada sektor pertanian. Sedangkan untuk perkebunan masyarakat memilih untuk menanam tebu yang juga tanaman andalan utama masyarakat Karangsono. Hal ini terlihat pada sepanjang jalan menghampar luas kebun dan sawah yang ditanami padi dan tebu.

Selain itu disisi lain, pekerjaan terbanyak kedua berada sektor bangunan dan pertukangan meskipun tidak sebanyak petani. Menurut cerita dari Ibu Nur (31) beberapa kepala keluarga yang bekerja pada sektor bangunan dan pertukangan seringkali ikut mandor dan ikut merantau ke Madura. Biasanya kepala keluarga yang ikut merantau pulang ke rumah satu kali dalam kurun waktu selama 3 bulan merantau.

Melihat dari perkembangan pekerjaan yang tertera pada tabel, peningkatan jumlah pekerjaan yang cukup signifikan terlihat pada sektor perdagangan dan jasa.

Hal ini disebabkan semenjak ramainya Sumber Maron yang mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan sekitar tahun 2012 sampai sekarang, mengingat dampak

dari pengembangan pariwisata bagi sektor ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah selain itu juga munculnya sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat (Soekadijo, 1996: 274). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah mata pencaharian masyarakat Karangsono pada sektor perdagangan. Apabila memasuki kawasan wisata Sumber Maron maka kita dapat menemui warung-warung kecil yang berada di pinggir area kolam berendam.

Dengan berkembangnya Sumber Maron menjadi objek wisata kini masyarakat mendapatkan lahan pekerjaan baru, baik itu hanya sekedar berdagang camilan atau hanya sekedar penyewaan ban berenang.

2.3.2 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Menurut Roucek dan Warren (1995: 103), masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki hubungan lebih intim antar sesama anggota masyarakatnya. Dalam konteks ini serupa dengan keadaan masyarakat Karangsono yang tampak pada ketika terdapat acara yang diselenggarakan oleh pemilik rumah seperti tahlilan bergilir, peringatan acara kematian (satu minggu penuh, 100 hari, 1000 hari), tujuh bulan mengandung, saat melahirkan, dan pengajian semua dilakukan dengan bergotong royong memasak di rumah sang pemilik hajat.

Sebagian besar kegiatan keagamaan berupa pengajian yang dilakukan bergilir antar rumah karena sebagian besar masyarakat Karangsono beragama Islam. Seperti tertera pada data statistik Desa Karangsono yang secara rinci dijelaskan melalui tabel berikut:

No.	Agama	Perempuan	Laki-Laki
1	Islam	2781 Orang	2601 Orang
2	Kristen	2 Orang	2 Orang
Total		2783 Orang	2603 Orang

Tabel 4 Agama yang dianut

Sumber: *Data Desa Karangsono tahun 2012*

Kegiatan keagamaan ini dilakukan rutin secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan warga bersama. Biasanya jadwal rutin pengajian yang dilakukan bergiliran adalah jadwal pengajian yang dilakukan setiap malam kamis. Pengajian dilakukan setiap malam, dimulai sekitar pukul tujuh malam hingga pukul delapan malam. Rutinnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono juga didukung dengan banyaknya pula komunitas jamaah pengajian baik itu yasinan atau jamaah Khotmil Quran.

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Pencak Silat	3	Kelompok
2	Sakera	1	Kelompok
3	Jama'ah Yasinan	13	Kelompok
4	Jama'ah Khotmil Qur'an	4	Kelompok

Tabel 5 Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Masyarakat
Sumber: *Sekretariat Desa Karangsono tahun 2015*

2.3.3 Organisasi Sosial

Salah satu organisasi yang cukup aktif di Desa Karangsono adalah organisasi KIM Arkatif. Keberadaan organisasi KIM Arkatif salah satunya bertujuan untuk mendukung program Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan persoalan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat diberdayakan supaya masyarakat dapat berperan aktif, khususnya dalam persoalan melek informasi dan teknologi. Salah satu peran KIM Arkatif yakni sebagai sebuah organisasi yang menaungi segala informasi yang terkait dengan Desa Karangsono, baik itu berupa gambaran umum Desa Karangsono, potensi yang ada di Karangsono, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Organisasi KIM Arkatif juga memiliki tanggung jawab mengenai promosi akan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Karanguko. Potensi desa yang dimiliki kemudian dipublikasikan di blog yang nanti akan dipresentasikan saat lomba cipta karya blog yang diadakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang. Konten yang dilombakan dan menjadi penilaian juri pada saat perlombaan yakni isi dari blog berupa potensi daya tarik wisata, potensi kuliner, potensi budaya, dan potensi produk UMKM. Meskipun tidak menjadi juara pada lomba cipta blog yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwisata namun organisasi KIM Arkatif tetap mengisi konten blog tersebut dan terbilang cukup *up to date*. Berikut adalah contoh website yang dimiliki oleh KIM Arkatif:



Gambar 3: Website KIM Arkatif Karanguko

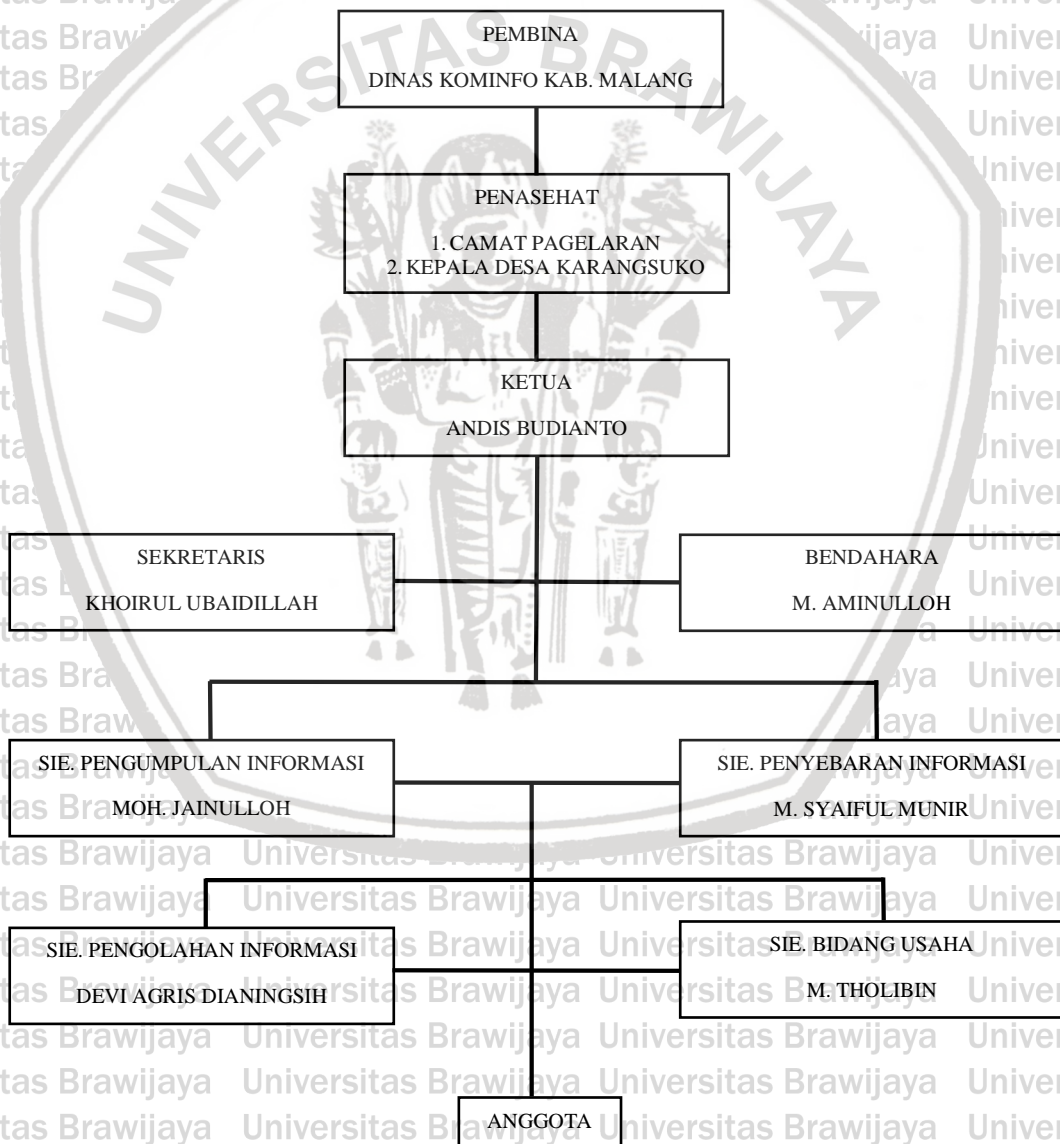
Sumber: <http://artipkarangsuko.blogspot.co.id/>

Konten di dalam website terbilang cukup lengkap, dalam blog tersebut ditampilkan pula potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Karanguko. Potensi pariwisata yang ditampilkan dalam website yaitu Sumber Taman, Sumber Maron, Sumber Jeruk, Coban Bendo dan Watu Konang. Namun yang menjadi andalan utama dalam pemaparan presentasi bagi organisasi KIM Arkatif menurut

penjelasan Bapak Andis (32 tahun) sebagai ketua organisasi yakni Sumber Maron.

Hal ini disebabkan Sumber Maron bukan hanya sebagai potensi pariwisata tetapi juga sebagai sumber daya alam yang dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Sesuai dengan SK Pemerintah Desa Karangsono nomor 148.8/09/421.625.2009/2015, berikut adalah struktur organisasi yang resmi terbentuk sekitar bulan Mei tahun 2015 :



Sumber: Sekretariat KIM Arkatif

2.3.4 Pendidikan

Mengenai permasalahan pendidikan, masyarakat Karangsudo sudah sangat berkembang dalam melihat pendidikan namun untuk meluangkan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dinilai masih sangat kurang. Salah satu alasannya adalah setelah mencapai pendidikan menengah atas (SMA) atau menengah pertama (SMP) sebagian besar pemuda di desa membantu pekerjaan orang tuanya atau bahkan mencari pekerjaan langsung dibandingkan harus melanjutkan sekolah lagi. Hal ini terlihat dari penjelasan pada tabel berikut ini:

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	2.	3.	4
1	SARJANA/Sederajat	83	Orang
2	SMA/Sederajat	1.556	Orang
4	SMP/Sederajat	2.065	Orang
5	SD/Sederajat	923	Orang

Tabel 6 Uraian Sumber Daya Manusia

Sumber: *Sekretariat Desa Karangsudo tahun 2015*

Meskipun tidak terlalu rinci dijelaskan mengenai data masyarakat yang tidak lulus SD ataupun yang tidak sekolah, namun berdasarkan data yang dijelaskan pada tabel terlihat bahwa masyarakat Karangsudo masih kurang dalam mengambil kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sarana sekolah yang disediakan di Desa Karangsudo sendiri terdapat 2 sekolah dasar negeri yang diantaranya adalah SDN 1 dan SDN 2 Karangsudo sedangkan untuk sekolah berbasis islam terdapat Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bustanul Ulum yang terdiri dari TK, Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat dengan SD dan MTS atau setingkat dengan SMP serta Pondok Pesantren Al Khoirot yang menyediakan MI

hingga Madrasah Aliyah (MA). Apabila siswa ingin melanjutkan ke sekolah formal negeri, sebagian siswa memilih untuk melanjutkan ke Gondanglegi.

2.4 Potensi Sumber Daya Alam Desa Karangsono

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan bahwa pengoptimalan keberagaman hayati yang ada di Indonesia saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah mengingat banyaknya potensi yang dapat dimunculkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik kepariwisataan. Fungsi dari pengoptimalan keberagaman hayati yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangsono selain memunculkan potensi yang ada di desa yakni juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga dapat memberdayakan masyarakat setempat sesuai juga dengan apa yang sudah tertulis pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan (UU No. 10 Tahun 2009: 6-7).

Begitu pula dengan Desa Karangsono yang memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang kini oleh pemerintah desa sedang dioptimalkan menjadi objek wisata, diantaranya adalah 3 sumber mata air yang berada di Desa Karangsono yaitu Sumber Taman, Sumber Maron dan Sumber Jeruk.



Gambar 4: Sumber Jeruk

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sebelumnya ketiga sumber mata air ini masing masing memiliki fungsi tersendiri, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Anik (34 tahun) dan Ibu Siti (46 tahun) kedua informan ini menjelaskan keterangan yang sama:

“sumber jeruk ini lho sek anyar mbak, dibangun 2015 lek gak salah. Sumber jeruk iku dibuat untuk ngairi sawah kono iku lho, dibendung trus nanti dialirkan ke sawah sawah kering yang ada di daerah utara. Kayak sumber taman iku dibendung buat ngalirin air ke sawah sawah daerah Brongkal. Iyo lek e Sumber Maron, aliran air e lak deres ya jadi kuat buat ngalirin air ke rumah warga” (wawancara dengan Ibu Siti 17/05/2016)

Informan kedua juga menjelaskan keterangan yang sama:

“kalau sumber jeruk ini sengaja dibangun dibendung kayak gitu mbak, buat penyelamatan mata air maksudnya penyelamatannya itu buat ngairi sawah bagian desa sukosari sama panggungrejo yang wilayahnya kering dan sulit air gitu” (wawancara dengan Ibu Anik 21/05/2016)

“Sama juga kayak sumber taman itu juga buat ngairi sawah sawah. Emang keliatannya (sumber jeruk) besar tapi gak sebesar sumber maron” (wawancara dengan Ibu Anik 21/05/2016)



Gambar 5: Sumber Taman
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Karangsuco juga dirumuskan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Pariwisata	3	Unit
2	Mata Air	4	Unit
3	Tanah Sawah	360	Ha
4	Tanah Bukan Sawah	52	Ha
5	Perkebunan	69	Ha

Tabel 7 Uraian Sumber Daya Alam

Sumber: *Sekretariat Desa Karangsudo tahun 2015*

Sesungguhnya Desa Karangsudo memiliki 3 sumber mata air besar yang akrab dengan kegiatan sehari-hari masyarakat Karangsudo. Sumber mata air tersebut adalah Sumber Taman yang letaknya berada di perbatasan Desa Brongkal dan Desa Karangsudo. Kemudian Sumber Maron yang terletak di Desa Karangsudo, begitu pula Sumber Jeruk yang juga di Desa Karangsudo dan jaraknya pun cukup berdekatan. Fungsi masing-masing dari sumber mata air ini berbeda, seperti Sumber Taman dan Sumber Jeruk yang digunakan untuk mengairi sawah ke desa-desa yang sawahnya mengalami kekeringan. Khusus untuk Sumber Maron, hanya sumber mata air ini saja yang dioptimalkan untuk dijadikan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Karangsudo karena debit airnya yang besar dan juga layak dikonsumsi masyarakat Karangsudo. Sumber Maron kemudian berkembang menjadi destinasi wisata yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ramai dikunjungi oleh wisatawan.

2.5 Objek Wisata Sumber Maron

Sumber Maron atau yang sering masyarakat meyakini sebagai sumber yang semula ada “maron” di dalamnya dan dari “maron” tersebut keluar air yang mengalir. Maron sesuai dengan penjelasan masyarakat setempat adalah tampaknya seperti sebuah panci dapur, namun terbuat dari tanah liat dan bentuknya seperti

sebuah setengah lingkaran. Awal mula keberadaan Sumber Maron banyak masyarakat yang tidak mengetahui namun mereka semua meyakini bahwa dibawah sana terdapat maron yang sudah ada berpuluh puluh tahun. Sumber Maron sudah ada semenjak zaman belanda dan sering digunakan untuk mandi oleh bangsa Belanda. Hanya saja sangat disayangkan cerita yang didapat hanya sebatas sampai itu sedangkan secara lengkapnya masyarakat merasa sudah kehilangan cerita mitosnya.

Keberadaan maron menurut penuturan dari sebagian masyarakat saat ini berada di Bali karena sebelumnya maron tersebut pecah akibat pembangunan sarana perpipaan saat pembangunan sarana WSLIC-II. Tidak terlalu banyak yang bisa menjelaskan asal mula Sumber Maron berasal dari mana karena warga Karangsudo sendiri merasa sejarah tersebut sudah hilang dan sudah tidak diwariskan kepada generasi generasi selanjutnya.

Sumber Maron sebelumnya adalah sumber mata air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat. Kebanyakan warga yang mengambil air ke Sumber Maron adalah warga Karangsudo sendiri, hal ini disebabkan Karangsudo adalah desa yang paling dekat dengan Sumber Maron.

Sesuai dengan pemaparan dari Ibu Nur (31 tahun):

“ya warga sini iku mbak lek ngambil air ke bawah (sumber maron) lha wong yang cidek mung iku tok, aku wes suwi nggawe sumur tapi yo ngono iku kudu nggali minimal 20 meter lagi iso keluar banyune” (wawancara dengan Ibu Nur 22/05/2016)



Gambar 6: Sumber Maron

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian semula yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan air masyarakat, pada akhirnya Sumber Maron berkembang menjadi objek wisata yang dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini menjadi objek wisata alami yang cukup populer (lihat berita <http://ilovemlg.com/berita/7-wisata-sumber-mata-air-yang-wajib-di-kunjungi-di-malang/>). Awal mula berkembangnya Sumber Maron menjadi objek wisata adalah pada tahun 2012, ketika air sumber mulai dibendung di bagian atas yang akhirnya saat ini menjadi kolam pemandian.



Gambar 7: Bendungan Atas

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pengembangan wisata ini tidak melalui beberapa serangkaian acara peresmian yang bersifat formal karena pada tahun yang sama dilakukan sebuah

acara peresmian dengan tujuan yang berbeda yakni peresmian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang diresmikan tepatnya pada tanggal 2 Mei 2012. Setelah diresmikannya PLTMH yang pada akhirnya mulai ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun warga yang berasal dari luar desa.

Ratman (2016) menyatakan bahwa pengembangan wisata bukan hanya berdasarkan memunculkan potensi alam yang dimiliki suatu wilayah namun, pengembangan objek wisata untuk dijadikan suatu destinasi wisata perlu adanya beberapa indikator penting yang diantaranya adalah pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata yang semuanya dikelola melalui pemberdayaan masyarakat (Ratman, 2016: 18). Hal ini terwujud dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Karangsono dalam mengelola kawasan wisata Sumber Maron, selain itu pula dibangunnya beberapa fasilitas umum seperti toilet, kamar ganti, perbaikan jalan sekitar kawasan wisata, musholla dan lahan parkir. Beberapa perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat tentu tujuan utamanya yakni sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan dan kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata (Ratman, 2016: 18).

BAB III

SUMBER MARON SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR

DOMESTIK

Sumber Maron merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Malang yang saat ini sedang populer. Keberadaan Sumber Maron sebelum menjadi objek wisata sudah digunakan terlebih dahulu sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Karangsono akan air. Air merupakan salah satu kebutuhan yang pokok karena setidaknya setiap hari aktivitas manusia berkaitan dengan air, seperti mandi, mencuci, memasak dan lain sebagainya.

3.1 Masyarakat Karangsono dan Air: Kebutuhan Pokok yang Belum Terpenuhi

Kebutuhan pokok seorang individu seperti yang sudah dirumuskan oleh Maslow (1970) salah satunya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yang dimaksudkan Maslow adalah kebutuhan yang lebih diketahui sebagai kebutuhan pokok manusia, kebutuhan yang bersifat dasar seperti kebutuhan akan makan, minum, protein, vitamin dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh (Maslow, 1970: 36). Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Haecckel (dalam Geertz, 1983: 4) secara sederhana bahwa proses fisiologi merupakan proses sosial dan budaya pada manusia yang memiliki ketergantungan terhadap lingkungan sekitarnya. Setidaknya hal tersebut juga dialami oleh masyarakat Karangsono, bagi mereka kebutuhan air merupakan salah satu kebutuhan pokok/utama.

Meskipun secara letak topografi Desa Karangsono cenderung pada kawasan dataran rendah, namun dalam memenuhi kebutuhan akan air terbilang masih sulit.

Hal ini disebabkan sambungan PDAM masih belum merata dan Desa Karangsono merupakan salah satu bagian desa yang belum mendapatkan layanan PDAM. “*ya belum masuk PDAM sini mbak, maklum daerah desa. Makanya kan kebanyakan orang desa nggunakan sumur sama kalau ada ya air sumber*” (Kutipan wawancara

Bapak Dafik 28/05/2016)

Tahun 2005 merupakan tahun dimana keadaan masyarakat Karangsono saat itu masih mengalami kesulitan mengakses air bersih. Meskipun bagi beberapa rumah yang dekat dengan air sumber, maka mereka akan memanfaatkan air sumber untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berkaitan dengan air seperti mandi, memasak dan mencuci. Bukan hanya masyarakat Karangsono saja yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air, begitu pula dengan Desa Panggungrejo yang pada saat itu terjadi konflik antar warga demi mendapatkan akses air bersih.

Sebagaimana yang sudah dirumuskan pada RPJMD Kabupaten Malang bahwa Desa Karangsono termasuk pada wilayah rawan kekeringan (RPJMD, 2016 :II-4).

Dalam memenuhi kebutuhan air, masyarakat biasa menggunakan air irigasi sawah dan air dongki. Air dongki sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zainudin (57) adalah air yang berasal dari pompa sederhana milik masyarakat yang memanfaatkan kincir untuk mengangkat air ke tempat yang lebih tinggi. Namun untuk sebagian besar masyarakat masih menggunakan air irigasi sawah karena untuk mendapatkan air hasil dongki perlu membutuhkan biaya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainudin dan Bapak Taufik (53) yang keduanya menyatakan kesamaan pendapat mengenai keadaan masyarakat sebelum tahun 2005:

“dulu itu mbak warga sini masih make air dongki, air dongki itu jadi air yang dinaikkan ke atas pake baling baling cuman kalau warga mau dapat air itu harus bayar ke orang yang punya dongki itu. Itu sih buat beberapa warga yang emang sulit dapat air, yang dekat sumber ya ngambil air ke sumber. Kayak saya ini ya dulu juga harus turun ke sumber juga kalau mau dapat air bersih. Malah kalau di Panggungrejo itu mbak, mesti rame rebutan air irigasi itu. Padahal air irigasi lho mbak.” (wawancara dengan Bapak Zainudin 23/5/2016)

Informan kedua menceritakan keadaan yang serupa secara garis besar:

“Tapi memang pada saat itu keadaan masyarakat ndak memungkinkan sekali untuk mendapatkan air bersih karena masih sulit dan ndak merata. Maksud dari nggak merata itu nggak semuanya mbak bisa ngambil air ke sumber maron, kan ya ada yang jauh jauh. Lek sampeyan tau Panggungrejo iku mbak, malah sampe carok carokan..” (wawancara dengan Bapak Taufik 22/05/2016)

Akses masyarakat terhadap air bersih tidak merata seperti yang diutarakan oleh Bapak Taufik disebabkan membutuhkan tenaga ekstra untuk mendapatkan air di sumber. Hal ini disebabkan letaknya yang jauh di bawah dan kondisi jalan yang menambah kesulitan warga untuk mengakses sumber mata air. Menurut beberapa cerita dulu jalan menuju sumber sesungguhnya adalah jalan khusus para petani yang ingin ke *tegalan*.

Kesulitan yang terjadi pada masyarakat berdampak negatif juga pada kesehatan masyarakat Karangsono pada saat itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat memanfaatkan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan penyakit. Menurut Pamsimas (2014), pada kenyataannya apabila masyarakat masih meneruskan kebiasaan memanfaatkan air irigasi sebagai pemenuhan kebutuhan air, bukan hanya dapat menyebabkan timbulnya penyakit,

bahkan dampak yang lebih ekstrem mungkin akan terjadi yakni dapat menyebabkan kematian (PAMSIMAS, 2014: 53). Meskipun belum pernah terjadi berita kematian perihal mengkonsumsi air irigasi di Karangsuko, hanya saja dalam jangka panjang kemungkinan besar 1 orang terancam akibat kebiasaan memanfaatkan air irigasi sebagai kebutuhan sehari-hari. Jumlah masyarakat yang mengalami penyakit kulit dan diare diketahui pada tabel berikut ini (Pranata, 2012: 92-93):

Tabel 8: Laporan Data Penyakit Diare Karangsuko tahun 2005-Mei 2012

No.	Usia	Tahun							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Mei 2012
1	0-1	19	15	13	14	11	10	8	0
2	>1-9	28	25	14	13	16	14	9	7
3	10-19	30	25	18	17	15	12	12	6
4	20-44	45	41	30	25	21	24	16	5
5	45-54	30	28	20	17	13	13	12	4
6	55-59	24	19	14	15	13	11	12	5
7	60-64	19	15	12	11	11	7	10	0
8	>70	15	11	10	9	8	7	10	0
Jumlah		210	179	131	121	108	98	89	27

Tabel 9: Laporan Data Penyakit Kulit Karangsuko tahun 2005- Mei 2012

No.	Usia	Tahun							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Mei 2012
1	0-1	13	13	14	11	10	9	8	4
2	>1-9	14	14	13	15	14	14	9	3
3	10-19	18	18	17	12	12	12	12	0
4	20-44	31	23	25	26	24	24	16	3
5	45-54	20	22	17	16	13	12	12	0
6	55-59	14	14	15	12	11	11	12	4
7	60-64	12	12	11	9	9	9	9	2
8	>70	10	9	8	7	7	5	9	0
Jumlah		132	125	120	108	100	96	87	16

Secara lanjut UNICEF juga melakukan penelitian terhadap masyarakat Indonesia, akibat dari penggunaan air sungai untuk konsumsi dan kebiasaan buang air besar di sungai menyebabkan tingginya angka penderita diare pada masyarakat

Indonesia dan angka tersebut mencapai 66% (UNICEF, 2012: 1). Pada skala yang lebih kecil lagi, terlihat pada masyarakat Desa Karangsudo dan sudah diterangkan pada tabel yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005, jumlah penderita penyakit kulit sebesar 132 dan penyakit diare berjumlah 210. Apabila melihat dari data yang ditampilkan oleh tabel tersebut setidaknya sekitar 30% masyarakat Karangsudo menderita penyakit endemik di tahun tersebut. Penyebab dari tingginya jumlah penderita penyakit kulit dan penyakit diare ini karena pada saat itu masyarakat Karangsudo sebagian masih menggunakan air irigasi sebagai pemenuhan kebutuhan air mereka.

Kebutuhan pokok manusia terkait dengan air ini juga bukan hanya persoalan air yang digunakan untuk konsumsi individu namun juga aktivitas lain yang berkaitan dengan air seperti misalnya pada lingkup rumah tangga, sebagian besar digunakan untuk mencuci dan mandi. Menurut Bapak Taufik (53 tahun) yang menceritakan pada saat itu masyarakat Karangsudo masih menggunakan air irigasi bukan hanya sebatas untuk mencuci dan mandi, namun juga mereka menggunakan air irigasi sebagai air yang dikonsumsi

“malah ya mbak dulu itu masih ada yang make air irigasi buat dikonsumsi sehari hari. Ya ada yang langsung direbus, ada juga yang aliran irigasinya dikasih eceng gondok biar bening airnya” (wawancara dengan Bapak Taufik 22/05/16)

3.1.1 Konsep Air Bersih Masyarakat Karangsudo

“Para orangtua memasak menggunakan air yang kotor. Anak anak berjalan kaki berjam jam lamanya untuk memperoleh air bersih. Sekolah kekurangan air mengalir untuk mencuci-tangan. Banyak keluarga menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar.” (PAMSIMAS, 2014: 3)

Pada kutipan tersebut seakan menjelaskan mengenai keadaan sebagian masyarakat Indoensia yang masih kesulitan akan sarana air bersih. Nyatanya meski banyak sekali potensi sumber daya alam, namun Indonesia masih belum dapat mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik. Padahal setiap tahunnya kebutuhan akan air bersih selalu meningkat namun permasalahannya adalah ketersediaan akan air bersih di Indonesia yang tidak bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia (*Sustaining Partnership*, 2011: 4). Maka tidak heran jika pada musim kemarau pemberitaan mengenai kekeringan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Meski banyak sekali sumber daya alam yang berpotensi untuk dapat mencukupi kebutuhan, potensi tersebut masih belum dapat dikelola dengan baik.

Keberadaan Sumber Maron berpotensi untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat Karangsono belum bisa dibaca baik oleh masyarakat setempat. Mungkin bukan karena potensi yang tidak terbaca, tetapi lebih kepada memerlukan usaha untuk mencapai ke sumber mata air. Hal ini karena letaknya yang cukup jauh dari rumah terlebih lagi akses jalan menuju sumber masih belum baik seperti saat ini. Beruntunglah bagi beberapa warga yang memiliki rumah dekat dengan sumber mata air.

“kalo ngambil air kan ya harus ke bawah lah mbak, jauh. Apalagi rumah saya kan. Bawa ember bolak balik ya males. capek hehehe” (wawancara dengan Ibu Siti 18/05/2016)

Beberapa warga masih rela berusaha untuk mendapatkan air bersih, hanya saja konsekuensinya mereka harus turun menuju sumber sembari membawa ember. Namun, bagi warga yang lokasi rumahnya agak jauh

dengan sumber dan dekat dengan sawah, mereka memilih untuk menggunakan air irigasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan air mereka sehari-hari.

Beragam cara yang dilakukan supaya air tersebut layak untuk digunakan. Mulai dari merebus airnya sampai menggunakan eceng gondok. Apabila warga yang ingin mengkonsumsi air irigasi, caranya adalah dengan merebus air tersebut maka kuman akan mati karena panas dari api dan hal ini yang biasa dilakukan oleh keluarga Bapak Zainudin (57 tahun). Namun penggunaan eceng gondok adalah cara yang dianggap lebih baik dibandingkan harus merebusnya langsung karena dengan menggunakan eceng gondok, air terlihat lebih jernih sehingga tidak terlalu keruh.

Beberapa warga yang tidak menggunakan air irigasi lebih memilih untuk menggali sumur meski untuk mendapatkan air harus menggali kurang lebih kedalamannya mencapai 20-30 meter.

“saya dulu masih pake sumur mbak, ya walaupun harus nggali bermeter meter dalemnya kan air sumur itu lebih baik timbang air sawah itu. Lebih layak dipakai buat sehari hari mbak. Ya yopo mbak lek gak nduwe duit ate bangun sumur kan mikir mikir sek” (wawancara dengan Bapak Taufik 22/05/2016)

Air merupakan kebutuhan yang berfungsi sebagai *economic goods* dan sifatnya sebagai *economic value* (The Dublin Principles, 1992). Hal ini sesuai dengan keadaan yang dijelaskan oleh Bapak Taufik sebelumnya bahwa untuk dapat mengakses air membutuhkan keadaan ekonomi yang cukup. Pernyataan tersebut seakan menegaskan bahwa

hanya masyarakat yang keadaan ekonomi berkecukupan saja yang dapat mengakses air.

Namun di sisi lain pemaknaan mengenai air bersih sesungguhnya sudah diketahui bagaimana kriterianya. Kriteria air yang layak secara sederhana dimaknai sebagai air yang tidak berbau dan berwarna jernih seperti pada umumnya air. Hanya saja kebiasaan aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang dilakukan di sekitar sungai masih menjadi sebuah rutinitas. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Anik (34 tahun) bahwa dulu mencuci di sungai itu hal yang biasa dan dibiasakan oleh orang tuanya dulu.

“biasane ya aku ke sungai Fi kalau nyuci. Wong enak kok, kan airnya ngalir kalo di sungai hehe. Aku mikirnya itu timbang nyuci nang kamar mandi kan nampung airnya dulu, buang airnya, digilas, ribet gitu lah. Kalo di sungai kan ramean, nyuci bareng, tinggal ngucek trus nanti dibilas kan airnya udah ngalir. Dari kecil aku dibiasakan gitu sama ibuku, tapi habis punya kamar mandi sendiri ya nyuci di dalem.” (wawancara dengan Ibu Anik 22/05/2016)

Beragam pemaknaan masyarakat terkait dengan pandangan masyarakat terhadap air bersih dapat ditinjau melalui beberapa faktor. Faktor yang sering dijumpai adalah wawasan yang dimiliki oleh individu, namun hal ini juga tidak dapat dipungkiri jika faktor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan juga berpengaruh. Dalam konteks ini, masyarakat yang berekonomi rendah dan keadaan yang sulit membuat sebagian masyarakat mau tidak mau memilih untuk menggunakan air irigasi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga kebutuhan dan keadaan ekonomi juga secara tidak langsung membuat pemaknaan tersendiri terhadap air bersih bagi masyarakat.

3.2 Sumber Mata Air Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Air

Kebutuhan akan air bersih juga berhubungan erat dengan sanitasi², hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan (Chaerunnisa, 2014:1). Apabila sarana air bersih masyarakat minim, maka sanitasi yang ada di masyarakat juga minim. Maksudnya apabila akses akan sarana air bersih minim maka akan berpengaruh pada perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kedua hal ini saling berkaitan dan sama sama memiliki pengaruh pada kesehatan masyarakat.

Akses air bersih yang masih minim dan ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat Karangsono yang masih menggunakan air sungai untuk melakukan aktivitas air, kemudian hal ini yang menjadi latar belakang permasalahan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Desa Karangsono. Sampai akhirnya pada tahun 2005 bantuan berasal dari pemerintah datang. Bantuan tersebut lebih dikenal masyarakat sebagai program WSLIC (*Water and Sanitation for Low Income Communities*) atau Program Air Bersih dan Sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program WSLIC adalah bantuan yang berasal dari *World Bank* dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan berupa penyelesaian permasalahan sanitasi dan kebutuhan air masyarakat desa yang masih belum terpenuhi. Selain guna mewujudkan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, program ini juga berusaha dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang sehat dapat menurun. Dalam konteks ini, Desa

² Definisi sanitasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat

Karangsono termasuk pada periode kedua dari WSLIC yang selanjutnya disebut sebagai WSLIC-II. Pada periode pertama, WSLIC beroperasi pada kisaran tahun 1993-1999. Sedangkan periode kedua WSLIC beroperasi pada kisaran tahun 2000-2009 (Adimihardj, 2009: 13).

Permasalahan sanitasi dan sarana air bersih merupakan permasalahan yang menjadi perhatian bagi pemerintah, baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Pada skala internasional terbukti dengan perumusan permasalahan yang tertulis di Millenium Development Goals yang menyatakan bahwa masyarakat yang tidak memiliki akses sarana sanitasi dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air menjadi perhatian utama (MDGs, 2015: 58).

Beragam bantuan yang berasal dari pemerintah diberikan melalui program yang berkonsentrasi pada sanitasi dan air bersih dan diantaranya program-program tersebut membawa perubahan. Solusi permasalahan yang diberikan pemerintah berupa implementasi program yang berkonsentrasi pada sanitasi dan air bersih.

Implementasi program tersebut terwujud pada program WSLIC-II..

Dana bantuan yang digunakan untuk membangun sarana sanitasi dan air bersih ini berasal dari berbagai pihak, berdasarkan laporan LP3ES tahun 2003 dana bantuan ini berasal dari pinjaman Bank Dunia, hibah dari pihak AusAID (Australia AID)³, dana pemerintah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga Daerah (APBN&APBD), serta kontribusi masyarakat (LP3ES, 2003: viii). Program WSLIC-II dilaksanakan di berbagai daerah dengan

³ Australia AID adalah program bantuan pembangunan pemerintah Australia yang berusaha mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan yang berkelanjutan (lihat [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/6\)%20Profil%20Lembaga%20Donor/4\)%20AUSAID/Apakah%20AusAID.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/6)%20Profil%20Lembaga%20Donor/4)%20AUSAID/Apakah%20AusAID.pdf))

orientasi wilayah pedesaan. Sesuai dengan telaah dokumen, program ini sudah tersebar ke 8 provinsi yang terdiri dari 36 kabupaten dan 2461 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10: Sasaran Lokasi WSLIC-II

Sumber: Laporan Akhir LP3ES Program WSLIC-II dan PAMSIMAS tahun 2007

No.	Provinsi	Kabupaten	No.	Provinsi	Kabupaten
1.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan Solok Sijunjung Pasaman	5.	Jawa Barat	Ciamis Cirebon Bogor
2.	Sumatera Selatan	Lahat Muara Enim Musi Banyuasin Banyuasin	6.	Jawa Timur	Mojokerto Bondowoso Ponorogo Blitar Malang Lumajang Bojonegoro Kediri Tuban Jember Pamekasan Sampang Sumenep
3.	Bangka Belitung	Belitung	7.	Sulawesi Selatan	Bone
4.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima	8.	Sulawesi Barat	Polewali Mamasa

Program WSLIC-II memberikan bantuan kepada desa dengan beberapa pertimbangan yakni, pemanfaatan akan air bersih oleh masyarakat masih rendah, cakupan akan sanitasi masih rendah dan penyakit berbasis lingkungan seperti diare di masyarakat cukup tinggi (Anonim, 2007: 5). Begitu pula dengan keadaan masyarakat Karangtuko pada saat sebelum tahun 2005 silam yang masyarakatnya masih menggunakan air irigasi untuk kebutuhan sehari hari.



Gambar 8: Monumen keberadaan program WSLIC-II

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Taufik (53) mengenai latar belakang bantuan WSLIC-II kepada Desa Karangsudo:

“karangsuko dulunya penyakit diarenya masih tinggi dan akses air bersih juga sulit makanya waktu itu karangsuko dapat bantuan wslic itu mbak. Bantuan itu juga ada kriterianya, tingginya penderita penyakit kulit sama diare kan berhubungan dengan air yang digunakan ya karena waktu itu masyarakat masih pake air irigasi. Nah alasan itu yang menjadi latar belakang wslic ini memberikan bantuan ke karangsuko. Kemudian selain itu juga dilihat potensi sumber daya alam yang ada, karena ada sumber maron ya untung bisa dipakai buat menuhi kebutuhan warga” (wawancara dengan Bapak Taufik 22/05/2016)

Sesuai dengan penjelasan oleh Bapak Taufik bahwa keadaan masyarakat Karangsudo pada sebelum tahun 2005 masih sulit mendapatkan akses akan air bersih. Seperti yang sudah diutarakan pada sub bab sebelumnya, terdapat tabel penderita penyakit kulit dan diare pada tahun 2005 terbilang cukup tinggi, apabila diakumulasikan sekitar kurang lebih 30% masyarakat Karangsudo mengalami penyakit kulit dan diare. Hal ini yang menjadi latar belakang utama pemerintah dalam memberikan bantuan yang terwujud pada program WSLIC-II. Meskipun

latar belakang utama bantuan program WSLIC-II terfokus pada permasalahan akses sarana sanitasi dan air bersih, namun yang menjadi pertimbangan selanjutnya yakni adanya potensi sumber air yang dapat digunakan dan teruji tes kelayakannya. Kemudian yang pada akhirnya pada tahun 2005 program ini mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Karangsono.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertimbangan bantuan program WSLIC-II, dalam hal ini potensi sumber daya alam yang digunakan untuk menyukseskan program WSLIC-II adalah Sumber Maron. Meskipun di Desa Karangsono memiliki beberapa sumber mata air, hanya Sumber Maron saja yang lolos tes kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain karena debit air yang besar, hanya Sumber Maron yang airnya layak untuk dijadikan konsumsi warga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang Syarat Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air pada Bab I Pasal 1 yang mendefinisikan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari hari dan dapat diminum setelah air tersebut dimasak yang mana kualitas syarat kesehatannya sudah terpenuhi. Pemilihan tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan dilakukan di 7 sumber mata air yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dafik (33 tahun) dan Bapak Zainudin bahwa pemilihan tersebut melalui serangkaian survey dan dilakukan penelitian oleh Dinas Kesehatan.

“kebetulan saya ikut mbak disuruh survey sama orang orang dari dinkes itu, kan di karangsuko ini sumber mata airnya banyak jadi harus di survey satu satu. Waktu itu saya survey 7 mata air mbak. Ya termasuk sumber maron itu. Saya lupa mana aja mbak hehe maaf ya. Tapi saya ingat kalau jumlahnya ada 7.” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

“Ibaratnya dibanding yang lain itu mbak sumber maron kalau pas musim kering debit airnya gak turun sampai drastis gitu” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

Informan kedua menjelaskan hal yang serupa:

“yang nguji kelayakan semua sumber mata air yang ada di karangsuko ini pihak dinkesnya mbak. Ya bukan Cuma karena aliran airnya aja yang tetap, apa itu istilahnya?..... Debit airnya maksudnya. Tapi emang cuma sumber maron yang airnya itu layak dikonsumsi. Ibaratnya mbak kalau sampeyan langsung minum air sumbernya itu ya gak apa apa” (wawancara dengan Bapak Zainudin 23/05/2016)

Kemudian setelah ditetapkan pilihan bahwa Sumber Maron adalah sumber mata air yang dapat digunakan dan dapat pula mencukupi kebutuhan warga Karangsuko, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat diberdayakan. Dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam membangun jaringan pipa yang gunanya untuk mengalirkan air ke rumah rumah warga. Selain membangun sarana perpipaan, masyarakat juga ikut serta dalam pembangunan sarana sanitasi seperti jamban umum. Pembangunan sarana sanitasi juga sangat diperlukan karena untuk menekan jumlah kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air irigasi untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci juga kebiasaan buang air besar di sungai.

Pembangunan jamban umum ini dilakukan di beberapa titik sungai. Sungai tersebut dipilih karena disana berlangsung aktivitas mandi dan buang air secara komunal. Salah satunya seperti jamban umum yang berada dekat dengan pintu masuk menuju Sumber Maron. Menurut Bapak Taufik jamban umum tersebut dibangun karena disana banyak sekali masyarakat Karangsuko yang mandi,

mencuci dan buang air di sungai tersebut. Dengan dibangunnya jamban tersebut diusahakan dapat merubah pola pikir masyarakat yang biasa melakukan kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) di sungai.



Gambar 9: Jamban Umum Dekat Sungai
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Bersamaan dengan berjalannya pembangunan sarana sanitasi umum untuk masyarakat Karanguko, kemudian masyarakat juga ikut serta dalam membangun sarana perpipaan dan tandon agar aliran air dapat merata ke seluruh RT di Desa Karanguko. Pembangunan ini dimulai pada tahun 2005 yang kemudian pada tahun 2006 program WSLIC-II mulai berjalan dan juga berkembang.

“dari keseluruhan jumlah RT yang ada di Karanguko, jumlahnya kan 15 itu pengembangan pertama wslic sudah masuk ke RT 1,2,3,4,9,10 sama 14. Jadi baru ada 7 yang instalasi”
(wawancara dengan Bapak Taufik 22/05/2016)

“pas sudah masuk tahun 2006, kemudian berkembang lagi jadi 9 RT dengan jumlah 125 KK. Sampai akhirnya pertengahan tahun 2006 seluruh RT di Karanguko terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Ya walaupun jumlahnya masih 267 KK, tapi karena masih tahap pengembangan itu sudah hasil yang memuaskan.”
(wawancara dengan Bapak Taufik 22/05/2016)

Seiring dengan perkembangannya yang meluas sampai akhirnya merata ke seluruh Desa Karangsono, program ini kemudian berkembang lagi ke luar Desa Karangsono. Perkembangan tersebut meliputi 3 desa yang keadaannya juga minim akan akses air bersih. Desa tersebut adalah Desa Sukosari, Gondanglegi Kulon, dan Panggungrejo dengan total keseluruhan sambungan rumah sampai pada tahun 2016 adalah 1787 KK. Dengan begitu, permasalahan sosial seperti konflik yang terjadi antar masyarakat akibat perebutan air bersih dapat terselesaikan. Berikut adalah jumlah konsumen terhitung sampai pada bulan mei 2016:

Desa	Konsumen			Jumlah
	RT	Usaha	Sosial	
Desa Karangsono	853	27	78	958
Desa Sukosari	476	13	17	506
Desa Gondanglegi Kulon	223	2	9	234
Desa Panggungrejo	81	2	6	89
Jumlah	1633	44	110	1787

Tabel 11: Jumlah Konsumen BPSAB&S

Sumber: Laporan Konsumen BPSAB&S Sumber Maron 2005-2016

Setelah masa pembangunan dan pengembangan tahun 2005-2006, pada tahun 2006 program WSLIC-II berhenti yang kemudian berubah menjadi yayasan mandiri yakni BPSAB&S Sumber Maron (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sumber Maron). Pemberhentian program WSLIC-II ini menandakan bahwa tugas pembangunan sarana sanitasi dan air bersih sudah terlaksana dan untuk menjaga serta memelihara sarana yang sudah dibangun selanjutnya menjadi tugas dari BPSAB&S.

“ya sebenarnya gak ada bedanya, kan program wslic itu berhenti tahun 2006. Nah habis itu dibentuk yayasan mandiri ini BPSAB&S Sumber Maron. Yang kepanjangannya itu Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sumber Maron. Maksudnya Sumber Maronnya kan karena dari sumber mata air sumber maron, nah nama BPSAB&S itu memang yayasan yang dinaungi langsung oleh Dinas Kesehatan. Ada juga dari Dinas Pekerjaan Umum yang juga bergerak di bidang sanitasi. Namanya PAMSIMAS. Sama aja tapi namanya gak mau disamakan” (Wawancara dengan Bapak Sayyid 18/05/2016)

3.3 Pasca WSLIC-II : Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSAB&S) Sumber Maron

Seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi antara masyarakat salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat pedesaan. Peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan cara meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan serta membangun sarana dan prasarana di kawasan pedesaan⁴. Melihat dari rancangan pembangunan nasional maupun daerah, pembangunan yang dilakukan di pedesaan adalah satu bentuk strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pembangunan desa merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan daerah (RPJMN, 2015: 13).

Berbagai strategi pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan diantaranya strategi tersebut yakni dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemanfaatan

⁴ Buku I RPJMN Tahun 2015-2019 Halaman 114-116 tentang Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat dan Buku II RPJMN Tahun 2015-2019 Halaman 12-16 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada praktiknya, terbentuknya organisasi BPSAB&S dan kemudian menjadi sebuah yayasan mandiri juga sebagai salah satu bentuk dukungan untuk mensukseskan program pemerintah terkait dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aktualisasi dukungan tersebut terwujud pada usaha dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Air adalah salah satu kebutuhan dasar dan dijadikan permasalahan utama yang perlu diselesaikan jika kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Kemudian dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasarana yang terfokus pada pembangunan sanitasi, dan yang terakhir strategi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini Sumber Maron dimanfaatkan sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Karangsuiko.

Yayasan BPSAB&S diketuai oleh pemimpin yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat, pemimpin tersebut dipilih berdasarkan forum yang diselenggarakan oleh pejabat pemerintahan desa⁵ dan masyarakat desa. Kriteria utama calon pemimpin yakni bukan berasal dari pejabat pemerintahan desa, sehingga calon pemimpin ini adalah murni yang dipercaya oleh masyarakat.

Sebelum BPSAB&S resmi menjadi sebuah organisasi yang mengkoordinasi setelah program WSLIC, masyarakat membuat sebuah lembaga sederhana sebagai koordinator saat program WSLIC berjalan. Pada akhirnya terbentuklah Tim Kerja Masyarakat (TKM) sebagai koordinator keuangan dan panitia pelaksana program WSLIC-II. Selain itu pula terbentuknya TKM yakni sebagai pihak yang

⁵ Pejabat pemerintahan desa yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berada dalam struktur organisasi pemerintahan desa.

menampung aspirasi masyarakat, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat *bottom-up* (bawah-atas). Pendekatan ini dikatakan cukup efektif mengingat sifatnya yang partisipatif dan sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat.

Tidak berbeda dengan pemilihan ketua BPSAB&S pada saat pra rencana WSLIC-II yang pada saat itu terbentuk TKM. Selain bertugas untuk memelihara aset WSLIC-II yang berupa sarana sanitasi dan air bersih seperti perpipaan, bendungan dan alat generator, yayasan BPSAB&S juga bergerak di bidang sosial.

Program kerja yayasan BPSAB&S yang bergerak di bidang sosial antara lain adalah santunan anak yatim, seluruh konsumen BPSAB&S mendapatkan fasilitas pengobatan gratis ke Polindes seperti berobat dan suntik gratis, bedah rumah, dan tagihan air gratis bagi sekolah, musholla, dan masjid. Sedangkan masyarakat yang tergolong pada golongan sosial, seperti keluarga miskin dan janda biaya perbulan hanya dikenakan kisaran sepuluh ribu rupiah.

Terkait dengan tarif air, yayasan BPSAB&S juga memiliki golongan tarif tersendiri. Pola tarif tersebut berbeda menurut jenis konsumennya, terdapat 3 golongan yakni golongan RT (Rumah Tangga), golongan usaha dan golongan sosial. Penentuan perbedaan tarif berasal dari pihak badan pengelola dengan persetujuan masyarakat, hal ini dilakukan supaya penggolongan tidak terjadi ketimpangan dan dapat terkena sasaran. Perbedaannya dari 3 golongan tersebut yakni golongan rumah tangga merupakan golongan konsumen yang menggunakan air dalam skala rumah tangga, sedangkan golongan usaha adalah golongan yang menggunakan air untuk usaha seperti toko, warung, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan usaha baik skala mikro dan makro, dan yang terakhir golongan

sosial merupakan golongan masyarakat yang kurang mampu dan fasilitas umum seperti sekolah, musholla, masjid dan balai desa.

Berikut penjelasan mengenai perbedaan tarif ketiga golongan yang sudah disebutkan sebelumnya (Pranata, 2012: 99):

Tabel 12: Skema Perbedaan Tarif Konsumen BPSAB&S Sumber Maron

No	GOLONGAN	KONSUMEN	
		Desa Karangsono	Luar Desa Karangsono
1	Rumah Tangga		
a	0-10 M3	Rp. 850	Rp. 1000
b	11-20 M3	Rp. 900	Rp. 1150
c	21-dst M3	Rp. 950	Rp. 1250
2	Usaha		
a	0-10 M3	Rp. 1400	Rp. 1750
b	11-20 M3	Rp. 1600	Rp. 2000
c	21-dst M3	Rp. 1800	Rp. 2200
3	Sosial	Rp. 500/M3	
a	0-10 M3		Rp. 800
b	11-20 M3		Rp. 850
c	21-dst M3		Rp. 900
4	BEBAN	Rp. 1500	Rp. 2500

Dalam menjalankan programnya pada bidang sosial, yayasan BPSAB&S juga melakukan bedah rumah masyarakat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maksud dari bedah rumah masyarakat ini adalah membantu pembuatan *water closet* (WC) dan kamar mandi pribadi bagi warga yang masih memiliki kebiasaan buang air, mandi dan melakukan aktivitas lain yang berkaitan dengan air di sungai. Pembuatan WC dan kamar mandi pribadi ini tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kebiasaan masyarakat akan buang air besar di sungai.

Dengan mengurangi kebiasaan tersebut, maka dengan harapan jumlah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat dapat berkurang.

Bagi masyarakat yang termasuk pada golongan masyarakat kurang mampu, mendapat santunan dari yayasan berupa pembuatan WC dan kamar mandi secara gratis. Pembuatan WC secara gratis ini dilihat berdasarkan tipe kamar mandi yang dimiliki, berupa *closet* atau cemplung. Jika masih menggunakan tipe cemplung, pembenahan akan didanai langsung oleh pihak BPSAB&S.

Golongan yang termasuk masyarakat miskin juga dipilih berdasarkan hasil survey dan data yang didapat oleh desa. Data tersebut berupa melihat jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan kepala keluarga dan penghasilan rumah tangga.

Sedangkan bagi golongan rumah tangga yang lain biaya pembuatan ini dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan dapat pula dicicil. Berikut adalah tabel data akses jamban yang ada di Desa Karangsuiko (Pranata, 2012: 93):

Tabel 13: Akses Jamban Desa Karangsuiko Tahun 2005-2011

TAHUN	WC	JAMBAN UMUM	TIDAK PUNYA AKSES
2005	150	3	864
2006	267		751
2007	324		662
2008	497		548
2009	602		441
2010	769		301
2011	808		181

Terhitung pada tahun 2005, masyarakat yang tidak memiliki akses jamban masih terbilang cukup tinggi yakni 864 unit. Sedangkan kepemilikan akan WC pribadi masih 150 unit di tahun yang sama. Kemudian dengan adanya program yang dilaksanakan oleh yayasan BPSAB&S Sumber Maron berupa pembangunan WC pribadi sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses jamban menjadi menurun di tahun tahun berikutnya dan kemudian di tahun 2011 terhitung berkurang sampai kurang lebih 80% dari jumlah awal yakni 181 unit. Begitu pula

kepemilikan WC yang menjadi meningkat sekitar 80% juga dengan total kepemilikan 808 unit.

Terwujudnya pembuatan WC pribadi ini juga didukung oleh peran masyarakat yang dipilih untuk dijadikan kader atau disebut sebagai kader PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Kader PHBS juga ikut berperan dalam memonitor masyarakat jika masih ada yang melakukan aktivitas air di sungai.

Kader ini juga bukan hanya bertugas sebagai pihak yang memonitor, namun juga ada sebagian kader PHBS yang ditunjuk sebagai koordinator posyandu. Jadi pembuatan posyandu ini juga menjadi bagian dari program BPSAB&S dengan tujuan dapat memberikan kemudahan masyarakat Karangsumo dalam berobat dan terciptanya hidup sehat yang tertanam pada masyarakat. Menurut cerita ibu Siti yang menjadi salah satu kader PHBS, setiap RT yang ada di Karangsumo memiliki kader PHBS jadi keberadaan kader ini berfungsi untuk memonitor masyarakat jika masih ada aktivitas mandi dan BAB di sungai. Kemudian mereka bertugas untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak negatif yang disebabkan apabila masyarakat masih menggunakan air sungai untuk mandi dan BAB dari rumah ke rumah.

Jika masih terdapat aktivitas mandi dan buang air di sungai, kader PHBS akan melaporkan aktivitas tersebut kepada bidan desa dan selanjutnya bidan desa akan melakukan penyuluhan baik itu dari rumah ke rumah maupun penyuluhan secara menyeluruh. Biasanya penyuluhan secara menyeluruh dilakukan di Balai Desa dengan mengundang seluruh warga desa. Dengan adanya kader PHBS menjadi salah satu pengaruh dalam merubah pola pikir masyarakat yang terbiasa

mandi dan buang air di sungai, terbukti dengan menurunnya jumlah penderita penyakit kulit dan diare semenjak program WSLIC-II berjalan.

No.	Usia	Tahun							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Mei 2012
1	0-1	19	15	13	14	11	10	8	0
2	>1-9	28	25	14	13	16	14	9	7
3	10-19	30	25	18	17	15	12	12	6
4	20-44	45	41	30	25	21	24	16	5
5	45-54	30	28	20	17	13	13	12	4
6	55-59	24	19	14	15	13	11	12	5
7	60-64	19	15	12	11	11	7	10	0
8	>70	15	11	10	9	8	7	10	0
Jumlah		210	179	131	121	108	98	89	27

Keterangan: Data Penyakit Diare terhitung tahun 2005-Mei 2012

No.	Usia	Tahun							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Mei 2012
1	0-1	13	13	14	11	10	9	8	4
2	>1-9	14	14	13	15	14	14	9	3
3	10-19	18	18	17	12	12	12	12	0
4	20-44	31	23	25	26	24	24	16	3
5	45-54	20	22	17	16	13	12	12	0
6	55-59	14	14	15	12	11	11	12	4
7	60-64	12	12	11	9	9	9	9	2
8	>70	10	9	8	7	7	5	9	0
Jumlah		132	125	120	108	100	96	87	16

Keterangan: Data Penyakit Kulit terhitung tahun 2005-Mei 2012

Dengan adanya program WSLIC-II yakni bantuan berupa pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dan juga dilanjutkan dengan program kerja yayasan BPSAB&S Sumber Maron yakni adanya pembangunan WC pribadi dan pembentukan kader PHBS seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat kini bukan hanya mudah dalam mengakses sarana sanitasi namun juga mereka dalam kebutuhan air bersih juga tercukupi. Hal yang dirasakan oleh konsumen

seperti yang dirasakan oleh Ibu Siti, Ibu Anik dan Bapak Zainudin setelah program

WSLIC-II dan BPSAB&S Sumber Maron sudah terlaksana dengan baik.

“saya dulu ya ngambil ke sumber mbak, wenak wes lek ono wslic iki. Gak usah jauh jauh lek ngambil air. Abot mbak hehehe. Ditambah lagi dengan adanya program buat wc pribadi di rumah warga itu mbak jadi kan sekarang wes gak ono lah sing bab opo mandi di sungai iko mbak” (Wawancara dengan Ibu Siti 17/05/2016)

Informan kedua menyatakan:

“biasanya orang orang harus ngambil ke bawah, sekarang kan enak tinggal nyalain keran udah ngalir airnya” (wawancara dengan Bapak Zainudin 23/05/2016)

Informan ketiga menceritakan terhadap kepuasan akan layanan:

“yo enak Fi kalo pas udah ada wslic gini, serba mudah. Pembayarannya gak memberatkan pelanggan, kalau ada kendala ya langsung diproses, kan yo orang e penakkan semua. Gak kayak di kota ya? Hehe” (wawancara dengan Ibu Anik 20/05/2016)



BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER MARON: PLTMH, WISATA, DAN AKSES MASYARAKAT KARANGSUKO

Bab ini akan menjelaskan mengenai keberlangsungan program yang dilakukan oleh Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi dalam mengelola Sumber Maron sebagai pemenuhan kebutuhan air. Potensi Sumber Maron selanjutnya dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sehingga dalam konteks ini Karangsudo bukan hanya dapat menyelesaikan permasalahan kekeringan namun juga mandiri dalam persoalan energi. Selain itu pula akan dibahas bagaimana keberlangsungan dalam pengelolaan Sumber Maron yang terus berkembang hingga menimbulkan potensi wisata.

Jika menganalisis lebih dalam, penerapan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan tiga aspek supaya dalam pengelolaan tidak menimbulkan dampak negatif yang dirasa merugikan. Tiga aspek tersebut yakni aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Dengan adanya analisis ini diharapkan konsep pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan bukan hanya berhenti pada sebuah analisis dan sebuah kebijakan namun sebagai sebuah solusi dalam memecahkan masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik pada jangka waktu pendek hingga kebutuhan generasi mendatang.

4.1 Keberlangsungan Sumber Maron sebagai Solusi Mengurangi Konflik Air Bersih

*“Water is life. Wherever they are, people need water to survive”*⁶

Keberlangsungan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia merupakan aspek penting apabila kita menganalisis secara mendalam pada kacamata antropologi ekologi. Terlebih lagi yang ditekankan pada antropologi ekologi bukan kepada bagaimana lingkungan ada dan terjaga tetap lestari namun lebih kepada bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dalam konteks ini bagaimana keberlangsungan lingkungan dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berkaca dari kalimat di atas bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan secara tidak langsung manusia bergantung pada air sebagai kebutuhan dasar. Terlihat ketergantungan kedua hal ini termasuk kepada hubungan antara manusia dan alam. Secara lanjut dibahas oleh Geertz (1976: 3) yang mengatakan bahwa hubungan antara kegiatan manusia, transaksi biologis dan proses alam tertentu merupakan kesatuan dalam sistem analisis yakni ekosistem yang merupakan bagian dari ruang lingkup ekologi.

Keberlangsungan lingkungan pada masa kini menjadi isu penting yang seringkali dikaji, mengingat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan dampak yang menyebabkan ketimpangan pada satu sektor khususnya pada lingkungan (Askar Jaya, 2004: 3). Sehingga dalam meminimalisir dampak yang terjadi dibutuhkan partisipasi yang berasal dari masyarakat untuk bersama

⁶ Petikan artikel National Geographic tentang Freshwater Crisis <http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 2:10

sama menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada tujuan berdirinya yayasan BPSAB&S Sumber Maron yakni untuk:

1. *Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah*
2. *Meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah*
3. *Terciptanya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat*
4. *Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi serta biaya pengelolaan secara efisien (berdaya guna), efektif (berhasil guna), ekonomis (biaya relatif murah)*
5. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat*
6. *Membuka lapangan kerja dari sektor air* (Suraya, 2014: 36)

Melihat tujuan yang dimiliki oleh BPSAB&S sebagai yayasan yang menaungi permasalahan sarana air bersih dan sanitasi merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Dalam konteks ini keberlangsungan yang dimaksud adalah pengoptimalan Sumber Maron yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Karangsono. Keberlangsungan Sumber Maron bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saja, namun juga terciptanya lingkungan yang baik dan pola hidup masyarakat yang bersih dan sehat juga terjamin.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sebelum program WSLIC-II ada, pola hidup bersih dan sehat masyarakat Karangsono masih tidak terjamin akibat penggunaan air irigasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam hal ini sasaran program BPSAB&S yakni meningkatnya derajat kesehatan dengan dibuktikan menurunnya angka penderita penyakit diare dan kulit yang terjadi di Desa Karangsono dapat terwujud. Selain itu pula salah satu bentuk upaya keberlanjutan sasaran program BPSAB&S mengembangkan program pembentukan posyandu. Selanjutnya menurut penjelasan Ibu Siti posyandu ini diadakan supaya masyarakat dengan mudah mengakses obat. Dengan keberadaan posyandu ini

diharapkan masyarakat sadar akan kesehatan masing masing dan angka penderita penyakit semakin menurun.

Program selanjutnya yang dikembangkan oleh BPSAB&S adalah pihak yayaya bekerja sama dengan polindes dalam hal ini masyarakat diberikan Asuransi Kesehatan (ASKES) untuk kemudian dapat berobat gratis ke polindes.

Implementasi program BPSAB&S sesuai dengan yang dijelaskan oleh Harris (2000: 5-6) pada aspek sosial yang menyatakan bahwa sistem yang berkelanjutan secara sosial haruslah mencapai keadilan distribusi memadai penyediaan pelayanan sosial salah satunya bidang kesehatan dan pendidikan. Pernyataan ini serupa dengan Sutamihardja (dalam Askar Jaya, 2004: 3) mengenai menjaga mutu kualitas hidup manusia antar generasi yang pada praktiknya dilakukan oleh BPSAB&S dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Karangsono.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang terwujud pada program WSLIC-II sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat berpartisipasi penuh dalam hal pembangunan. Sehingga semenjak pada perencanaan program sampai kepada implementasi program, keberlanjutan program tersebut masih berjalan hingga penelitian ini berlangsung. Bahkan program tersebut kemudian dikembangkan oleh BPSAB&S yang terwujud pada program monitoring kartu rumah tangga. Monitoring kartu rumah tangga bertujuan untuk pendataan rumah yang belum memiliki standar akan kesehatan. Pendataan tersebut mengacu kepada 6 indikator standar kesehatan yakni 1) kepemilikan akses air bersih, 2) kepemilikan akses jamban, 3) lantai rumah, 4) ventilasi rumah, 5) sistem pembuangan air limbah, dan 6) tempat sampah (Suraya, 2014: 54). Dalam upaya untuk mengimplementasikan program, masyarakat diberdayakan untuk

bersama berpartisipasi penuh dalam menjaga keberlangsungan dan pada praktiknya pengimplementasian program monitoring kartu rumah tangga dilakukan oleh kader PHBS sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Siti (46):

“ya ada gitu mbak monitoring tiap tahunnya rutin. Yang monitoring itu tiap kader phbs dan ndatengi rumah ke rumah. Monitoringnya itu jadi dilihat ada akses air bersihnya ada atau enggak, trus punya wc atau enggak, dilihat tipe rumahnya itu lantainya tipe keramik atau yang masih kayak tanah itu mbak. Nah kalau yang enggak punya wc itu didata trus nanti dilaporkan ke pihak wslc untuk diberikan santunan pembuatan wc pribadi di rumah” (wawancara dengan Ibu Siti 17/05/2016)

Upaya agar program tersebut dapat terwujud terlihat dari kader PHBS yang berasal dari masyarakat Karangsono ikut berpartisipasi penuh dalam program monitoring ini. Partisipasi tersebut bukan hanya terlihat dari pembentukan kader PHBS, namun partisipasi tersebut bahkan sudah tampak saat semenjak perencanaan program WSLIC-II sampai kepada pengimplementasian program WSLIC-II. Wujud partisipasi tersebut terlihat pada saat masyarakat ikut membangun sarana pipa untuk kemudian disambungkan ke rumah supaya masyarakat mendapatkan aliran air. Keberlanjutan program juga didukung dengan adanya pembentukan lembaga dalam hal ini terwujud sebagai yayasan BPSAB&S. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Drakakis-Smith (dalam Hastu Prabatmodjo, 2006:3) yang menyatakan bahwa pada pembangunan berkelanjutan setidaknya memiliki tujuan akhir pada aspek sosial yakni dengan terwujudnya pemberdayaan, partisipasi, mobilitas sosial, identitas budaya dan kelembagaan.

4.2 Pengembangan Sumber Maron: Dari PLTMH menjadi Destinasi Wisata

Seiring berjalannya waktu, dengan pencapaiannya yang memuaskan yakni dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sarana sanitasi masyarakat

kemudian yayasan BPSAB&S mengembangkan pembangunan alat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada tahun 2012. Latar belakang dari pembangunan PLTMH ini adalah akibat tagihan listrik dari PLN yang terlalu mahal dan yayasan BPSAB&S membutuhkan biaya setidaknya minimal Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- untuk dapat mengoperasikan pompa air. Fungsi dari pompa air ini adalah untuk dapat mengalirkan air yang berasal dari sumber mata air untuk diteruskan menuju rumah warga.

Semenjak dibangunnya sarana air bersih pada tahun 2006, selama hampir kurang lebih 4 tahun yayasan BPSAB&S Sumber Maron masih berlangganan listrik dari PLN dengan biaya operasionalnya yang cukup tinggi setiap bulannya. Sesungguhnya potensi air yang dimiliki oleh Sumber Maron terbilang cukup besar apabila ingin dikembangkan, bukan hanya dapat mencukupi kebutuhan warga akan air namun juga dapat dikembangkan sebagai sumber energi (Irfan, 2015: 39). Sesuai dengan penjelasan oleh Mokhtar (2013), Sumber Maron memiliki kapasitas sekitar 1200 liter/detik sedangkan kebutuhan masyarakat agar dapat tercukupi kebutuhan air hanya berkisaran 5 liter/detik (Mokhtar, 2013: 7). Potensi ini kemudian terbaca oleh Bapak Sayyid dan kemudian beliau mulai mempelajari mengenai Mikro Hidro. Sehingga pada tahun 2009, yayasan BPSAB&S bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk melakukan studi kelayakan terhadap Sumber Maron.

“karena biaya sewa dari PLN kan mahal, nah saya coba mutar otak gimana caranya supaya bisa menekan biaya listrik per bulan itu lalu saya belajar teknologi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang sederhananya menggunakan aliran air yang asalnya dari sumber daya air yang ada di desa ini. Nah yang kemudian kebetulan ada anak UMM KKN disini lalu inisiatif untuk mencoba mengajukan permohonan bantuan untuk uji kelayakan untuk membuat mesin mikro hidro di Brawijaya Maron dan ternyata pada tahun 2009, mereka setuju dan mulailah pembuatannya” (wawancara dengan Bapak Sayyid 18/05/2016)

Informan kedua juga menjelaskan:

“kan masih ada potensi untuk dikembangkan lagi mbak dari sumber maron itu, ibaratnya kalau cuma buat dipake kebutuhan air untuk rumah tangga ya masih kepeke sekitar 30% sedangkan debit airnya tinggi. Bisa di lihat itu di keterangan profil (sambil menunjuk papan dekat pintu)” (wawancara dengan Bapak Zainudin 23/05/2016)

Kemudian dengan dilaksanakannya pembangunan PLTMH, akhirnya pembangunan dapat terealisasi pada tahun 2012. Acara peresmian pembangunan PLTMH dilakukan di Desa Karangsuiko pada tanggal 2 Mei 2012 dan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Malang yakni Bapak Rendra. Sesuai dengan telaah dokumen, sarana yang dibangun berupa pembuatan bendungan dan intake, bak pengendap, saluran pembawa, bak penenang dan pipa pesat, rumah pembangkit yang di dalamnya terdapat turbin dan generator, kontrol panel dan jaringan listrik (Irfan, 2015: 40).



Gambar 10: Bendungan dan Intake
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 11: Tandon

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah pembangunan PLTMH selesai di tahun 2012 dan diresmikan langsung oleh Bupati Kabupaten Malang, Sumber Maron mulai ramai oleh orang-orang yang berkunjung. Baik itu orang yang hanya sekedar berkunjung untuk melihat-lihat dan yayasan BPSAB&S juga biasa menerima tamu untuk dijadikan pemateri bagi wisatawan yang melakukan studi banding. Studi banding dilakukan di Sumber Maron karena prestasi yang dilakukan oleh yayasan BPSAB&S dalam hal pembangunan PLTMH. Prestasi itu bukan hanya dalam pembangunan PLTMH, prestasi lainnya seperti:

<i>Prestasi yang dicapai</i>	<i>Tahun</i>
<i>Juara III Hippiam Provinsi Jawa Timur</i>	2010
<i>Juara I Hippiam Nasional</i>	2011
<i>Penghargaan Energi Prakarsa</i>	2011
<i>Penghargaan Lingkungan Hidup</i>	2013
<i>Penghargaan Kalpataru</i>	2013

Tabel 14: Daftar Pencapaian Prestasi BPSAB&S Sumber Maron

Wisatawan yang melakukan studi banding berasal dari beberapa kalangan, baik itu yang berasal dari siswa sekolah ataupun yang berasal dari kedinasan luar.

daerah. Kemudian pada akhirnya tercetus nama “wisata edukasi” Sumber Maron, selain wisatawan dapat berkunjung melihat panorama alam sumber mata air yang jernih, wisatawan juga diajak untuk melihat proses dari teknologi mikro hidro.

Secara lanjut Sumber Maron berkembang menjadi sebuah destinasi wisata memang bukan sesuatu hal yang disengaja untuk dijadikan destinasi wisata, namun menurut Bapak Andis (32 tahun) dan Bapak Sayyid (42 tahun) diyakini mulai ramai dikunjungi orang setelah kunjungan bapak Rendra saat peresmian PLTMH di tahun 2012.

“gak ada peresmian lek e gak salah Fi, soalnya kan waktu bulan mei itu emang ada acara kayak bikin terop di balai desa tapi waktu itu seingetku itu dalam rangka nyambut pak Rendra buat peresmian PLTMH. Nah habis itu kayak e sumber maron rame sama orang orang yang mau lihat” (wawancara dengan Bapak Andis 30/05/2016)

Informan kedua yang secara jelas menceritakan mengenai peresmian PLTMH:

“peresmian PLTMH langsung dikunjungi dengan pak Rendra, saya ingat sekali waktu itu tanggal 2 Mei 2012. Ya karena bendungan yang atas itu bisa dibuat renang, makanya orang orang rame buat berenang disitu” (wawancara dengan Bapak Sayyid 17/05/2016)

Keberadaan bak penenang yang berada di atas kemudian menjadi ramai dikunjungi oleh wisatawan dan saat ini digunakan sebagai fasilitas berenang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sayyid sebelumnya. Semula bak penenang berfungsi sebagai bendungan air yang kemudian mengantarkan air menuju pipa pesat dan diteruskan menuju turbin dan alat generator.



Gambar 12: Bak Penenang dan Pipa Pesat

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selama penelitian ini berlangsung, wisatawan ramai berkunjung pada hari Sabtu dan Minggu. Biasanya wisatawan mulai berdatangan sekitar pukul delapan pagi. Sedangkan pada hari biasa seperti Senin sampai dengan Jumat, wisatawan cenderung datang sekitar jam dua siang. Jika masuk liburan tanggal merah, pemandangan ramainya wisatawan yang sedang berjalan melewati depan rumah warga menjadi suatu hal yang biasa. Menurut cerita Ibu Nur dan Ibu Anik, terakhir kali mereka melihat pengunjung yang ramai adalah saat liburan tahun baru yakni bulan Januari 2016.

Pengunjung yang menyerbu Sumber Maron sampai dimuat di berita online, seperti yang dipaparkan di website *sentralone.com* (2015) pada liburan natal di bulan Desember dan liburan tahun baru di bulan Januari pengunjung memadati kawasan wisata. Ramainya pengunjung merupakan sumber rejeki bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Hal ini dimanfaatkan oleh warga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, biasanya mereka membuka lapak jualan yang sederhana.

Seringkali yang dapat kita jumpai jika berjalan dari parkiran kendaraan menuju Sumber Maron tampak warga berjualan makanan *sempol*, minuman dan makanan

ringan lainnya. Bahkan parkir dekat lapangan rumah dan lahan parkir yang berada di pekarangan rumah warga terisi oleh mobil, motor dan bis pariwisata.



Gambar 13: Wisatawan saat liburan tahun baru

Sumber: <http://sentralone.com/daerah-musim-liburan-natal-tahun-baru-wisata-air-sumber-maron-diserbu-pengunjung.html>

Dengan keberadaan Sumber Maron yang saat ini menjadi destinasi wisata menjadi keuntungan tersendiri oleh masyarakat setempat, khususnya rumah warga yang jaraknya dekat dengan lokasi Sumber Maron. Mereka menyediakan tempat parkir khusus wisatawan yang ingin datang berkunjung. Bukan hanya inisiatif penyediaan lokasi parkir, apabila kita memasuki lokasi Sumber Maron disana terdapat tempat penyewaan ban, sepeda air dan warung makanan yang juga menyediakan kamar mandi.



Gambar 14: Sepeda Air

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berkembangnya sarana air bersih Sumber Maron menjadi destinasi wisata membawa dampak positif tersendiri, terutama bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan keberadaan Sumber Maron. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI (1969) mengenai pengembangan pariwisata yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan negara dan masyarakat, perluasan kesempatan pada lapangan pekerjaan dan juga mendorong kegiatan industri sampingan masyarakat.



Gambar 15: Warung Makan dan Sewa Ban
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pengembangan Sumber Maron jelas membuat peningkatan pada sektor ekonomi, hal ini sejalan pula dengan pernyataan Pitana dan Gayatri (2005:3) bahwa pariwisata merupakan industri yang besar dan merupakan andalan dalam menghasilkan devisa. Pernyataan Pitana dan Gayatri (2005) juga mendukung pernyataan pada Instruksi Presiden yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat. Sehingga dengan adanya wisata Sumber Maron dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan melalui berjualan makanan atau sekedar penyediaan lahan parkir.

Dengan begini Sumber Maron dapat dioptimalkan sebagai fungsi ganda, selain sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi juga sebagai objek wisata. Pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dilakukan oleh pemerintah desa karena dapat meningkatkan potensi yang berada di desa melalui pariwisata (Rahmawati, 2007: 2).

4.3 Pengelolaan Wisata Sumber Maron

Potensi Sumber Maron menjadi objek wisata kemudian ditindak lanjuti oleh pihak BPSAB&S. Dalam usaha menjaga sarana yang ada di Sumber Maron perlu diberlakukannya pengelolaan, bukan hanya sekedar upaya dalam mengembangkan wisata untuk menarik para wisatawan. Upaya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak BPSAB&S adalah dengan diberlakukannya sistem tiket masuk setiap wisatawan yang berkunjung membayar Rp. 1000,-. Namun pemberlakuan tiket ini hanya berlaku pada hari sabtu dan minggu karena kedua hari itu biasanya Sumber Maron ramai oleh pengunjung. Menurut penjelasan Bapak Sayyid, pemberlakuan sistem tiket ini dimulai pada tahun 2012 semenjak PLTMH juga beroperasi dan pemberlakuan tiket ini digunakan untuk mengembangkan prasarana yang ada di sekitar Sumber Maron sampai pada akhirnya saat ini prasarana yang berhasil dibangun adalah jalan setapak, jembatan dan musholla.

Pengelolaan wisata ini masih dilakukan secara mandiri, mulai dari prasarana parkir dan penjualan tiket berasal dari masyarakat Karangsono sendiri. Sehingga dalam hal ini masyarakat berpartisipasi penuh dalam hal pengelolaan wisata Sumber Maron. Jika sebelumnya pengelola wisata Sumber Maron berasal dari pihak BPSAB&S, saat ini pengelola sudah berasal dari pihak desa. Bapak Andis

(32), berpendapat bahwa dengan melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengelolaan dapat mengurangi kesenjangan antar masyarakat.

“jadi gantian gitu mbak, kalau yang jaga tiket itu ada 2 orang ibu ibu yang asalnya dari PKK sama 2 orang dari linmas. Di bagian pembayaran ada 2 ibu ibu sama 1 bapak linmas trus pas sampeyan turun ke bawah itu kan sekarang ada yang ngerobeki tiketnya nah itu bapak bapak dari linmas. Tiap hari ya ganti, biar maksudnya kan gak ada yang ngiri. Masa yang jaga orangnya itu aja nanti jadi bahan omongan, disangkanya nggak adil.” (Wawancara dengan Bapak Andis 19/05/2016)

Pada praktiknya, pengelolaan memang sebaiknya melibatkan masyarakat secara keseluruhan supaya meminimalisir konflik yang terjadi terkait dengan kesenjangan sehingga masyarakat mendapatkan porsi yang adil (Nurhidayati, 2007:

6). Namun karena wisata Sumber Maron terbilang baru dan masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan benturan. Benturan tersebut salah satunya adalah dengan sistem pengelolaan yang semula dilakukan oleh pihak BPSAB&S yang dianggap tidak menghasilkan banyak perubahan bagi masyarakat Karangsono.

Penghasilan yang berasal dari penarikan tiket yang dilakukan oleh BPSAB&S semula langsung diberikan oleh desa dengan tujuan untuk perbaikan prasarana yang ada di sekitar Sumber Maron. Hanya saja perbaikan yang dilakukan oleh pihak desa dirasa tidak membawa perubahan yang signifikan, hasil yang dirasakan hanya sekedar pembuatan jembatan yang berada di tengah supaya wisatawan dapat mengakses jalan menuju *grojogan sewu*.



Gambar 16: Jembatan penghubung jalan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Konflik yang bersitegang antara pihak desa, pengelola BPSAB&S dan masyarakat membuat warga Karangsono menjadi resah. Menurut pernyataan Bapak Andis, dengan keberadaan yayasan BPSAB&S sebagai yayasan yang berdiri secara mandiri dianggap dana yang berasal dari penarikan tiket malah tidak meningkatkan kesejahteraan warga Karangsono. Namun hal ini diperjelas oleh Bapak Sayyid sebagai ketua yayasan bahwa sebenarnya berdirinya yayasan BPSAB&S bukan berdasarkan kepentingan pribadi namun seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa setelah program WSLIC-II terealisasi, untuk menjaga fasilitas yang berada di Sumber Maron maka dibentuklah yayasan BPSAB&S yang berasal dari TKM.

Permasalahan yang disebabkan karena kesalah pahaman antara masyarakat, pemerintah desa dan BPSAB&S kemudian berlanjut menuju meja hijau. Menurut penjelasan Bapak Sayyid, kejaksaan berusaha menjadi pihak yang memediasi antara masyarakat, pemerintah desa dan BPSAB&S supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai pengelolaan Sumber Maron. Pengelolaan yang dimaksudkan oleh pihak BPSAB&S adalah pengelolaan yang dilakukan supaya sarana yang berada di sekitar Sumber Maron berupa seperangkat alat PLTMH dapat terawat dengan baik.

Pada akhirnya jalan keluar dari permasalahan mengenai pengelolaan Sumber Maron adalah dengan diberlakukannya sistem tiket yang secara resmi dikelola oleh masyarakat. Masyarakat membentuk organisasi pengelola wisata dibawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Keberadaan organisasi pengelola bertujuan untuk mengontrol uang masuk yang berasal dari penarikan tiket dan diberlakukannya sistem bagi hasil. Bagi hasil tersebut berupa 30% dari pendapatan tiket masuk wajib diberikan kepada Dinas Pariwisata dan sisanya masuk kepada kas desa. Jadi perbandingan bagi hasilnya 30:70, presentase pendapatan sebesar 70% masuk kepada kas desa untuk kemudian digunakan memberikan gaji kepada orang yang menjaga loket dan keperluan lainnya seperti pembelian tiket. Sistem bagi hasil pendapatan ini yang diharapkan dapat mengembangkan kembali prasarana yang belum ada atau perbaikan prasarana yang sudah ada.

".....akhirnya ya dari dinas pariwisata itu bentuk organisasi pengelola resmi gitu mbak, langsung dibawah naungan dinas. Ya biar gak berantem lagi kayak dulu, soalnya dulu itu aduuuhh... masalah ini lanjut masalah itu.. pokoknya tahun lalu itu masalah tok isine hahaha. Pengelola yang dibentuk itu buat pembagian pendapatan hasil penarikan tiket mbak, jadi ke dinas 30% trus nanti 70% masuk ke kas desa untuk pengembangan sarana prasarana wisata dan gaji penjaga itu." (wawancara dengan Bapak Andis 19/05/2016)

4.4 Pengembangan Wisata Sumber Maron sebagai Bentuk Dukungan Kepada Industri Kecil

Dalam rumusan Sutamihardja (dalam Askar Jaya, 2004: 3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya semata untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan. Dengan memanfaatkan Sumber Maron yang saat ini menjadi objek wisata, masyarakat kini mendapat lapangan pekerjaan baru sehingga dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terwujud. Hal ini juga tercermin pada salah satu tujuan

yayasan BPSAB&S Sumber Maron yakni membuka lapangan pekerjaan dari sektor air. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainudin bahwa dengan berkembangnya Sumber Maron menjadi objek wisata membawa dampak positif diantaranya masyarakat yang membuka lapak untuk jualan di sekitar objek wisata, penyediaan lahan parkir, dan penyediaan fasilitas *rest area* untuk wisatawan.



Gambar 17: Rest Area wisatawan Sumber Maron
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Namun bukan hanya pekerjaan yang berhubungan dengan sektor wisata masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan baru, dengan berlangsungnya program sarana air bersih setidaknya terdapat usaha konstruksi bangunan seperti usaha batu bata kemudian bermunculan. Salah satunya adalah usaha Bapak Dafik yang mengandalkan air Sumber Maron guna usaha batu batanya

“saya dari tahun 2008 mbak usaha batu bata ini. Ya airnya dari Sumber Maron itu. Sebulan saya bayar 15ribu kurang lebih. Kan skema tarife beda beda to mbak karena saya di bidang usaha jadi ya kena tarif usaha.” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

“.....ya semenjak air mudah aja jadi banyak usaha batu bata ada 30an atau 40 ya? Sekitar segitu. Wong ndeso mbak, ono usaha batu bata iki kabeh melu melu usaha batu bata hahaha jadi yo wakeh” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

Pada konsep indikator pembangunan wisata berbasis pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia dijelaskan

bahwa keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata. Hal ini pula didukung dengan konsep yang diutarakan oleh Drakakis-Smith (dalam Hastu Prabatmodjo, 2006: 3) bahwa tujuan ekonomi yang dioptimalkan pada pembangunan yang berkelanjutan adalah tujuan dalam pencapaian pertumbuhan, pemerataan dan efisiensi. Pengembangan wisata Sumber Maron membawa dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Karangsono, keberadaan lapangan pekerjaan baru meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat sehingga bukan hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja sebagai mata pencaharian utama.

Dalam konteks ini dapat dilihat melalui pekerjaan sampingan yang dimiliki oleh Ibu Nur yakni sebagai pedagang *sempol* dan pekerjaan ini sebagai tambahan untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

“suami saya itu rantau to mbak. Ya pulang tiga bulan sekali. Kan kalau sambil jualan gini saya bisa nambah nambah buat jajan sehari hari anak. Lagian karena masih kecil jadi banyak minta jajan. Belum lagi kalau saya buwuh gitu ke tetangga. Buat belanja sehari hari kalau uang kiriman suami saya pas pasan”
(wawancara dengan Ibu Nur 22/05/2016)

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Anik, meskipun bukan sebagai pelaku ekonomi yang berkaitan dengan wisata Ibu Anik menanggapi pengembangan wisata Sumber Maron membawa dampak yang positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.

“ini tetangga sebelah kan dulunya ternak ayam to Fi disini (sambil menunjuk area parkir) setelah orang rame ke sumber maron trus dia bangun parkir gitu itu. Kayaknya kalo gak salah udah 2 tahun lalu. Bagus lah buat nambah nambah penghasilan kan, kasian soalnya yang punya itu janda” (wawancara dengan Ibu Anik 30/05/2016)

Keberadaan Sumber Maron merupakan sebuah peluang dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar tempat tujuan wisata. Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh *World Commision on Environmet and Development* yang menyatakan bahwa konsep mengenai keberlanjutan adalah pemenuhan kebutuhan esensial yang dalam konteks ini adalah kebutuhan akan sandang, pangan, rumah dan pekerjaan dan aspirasi manusia dapat terpenuhi dan merupakan tujuan utama dari sebuah pembangunan yang berkelanjutan (*World Commision on Environment and Development*, 1988:61).

4.5 Wisata Sumber Maron: Akses Masyarakat yang Terganggu

Sebagai sumber utama yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana air bersih, dalam masa pengembangannya Sumber Maron kemudian memperluas cakupan layanan sambungan rumah bukan hanya melayani Desa Karangsuco namun juga melayani 3 desa lainnya yakni Panggungrejo, Gondanglegi Kulon dan Sukosari. Hal ini mengingat potensi Sumber Maron masih dapat dikembangkan lagi dengan harapan sambungan rumah semakin banyak sehingga permasalahan seperti tidak tercukupinya kebutuhan air bersih dapat teratasi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai saat ini jumlah layanan secara keseluruhan adalah 1787 KK. Melihat perkembangan pola kehidupan masyarakat Karangsuco saat ini dapat dikatakan sudah cukup layak, baik pemenuhan kebutuhan air dan juga sarana sanitasi sehingga terciptanya kehidupan yang bersih dan sehat. Keberadaan BSPAB&S sebagai yayasan yang menaungi dan memonitor juga melakukan kerjanya dengan baik. Bukan hanya perawatan sarana air bersih dan sanitasi saat program WSLIC-II bahkan yayasan

ini juga inisiatif dalam hal penghematan biaya dengan mengembangkan potensi

Sumber Maron menjadi PLTMH. Potensi Sumber Maron sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan air juga kemudian berkembang menjadi objek wisata. Saat ini, Sumber Maron termasuk pada wisata alami desa yang populer di area Malang (lihat berita <http://ilovemlg.com/berita/7-wisata-sumber-mata-air-yang-wajib-di-kunjungi-di-malang/>).

Pemanfaatan sumberdaya alam yang kemudian berkembang menjadi objek wisata disambut baik oleh warga Karangsono. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya Sumber Maron menjadi objek wisata, setidaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik itu sebagai usaha sampingan atau pekerjaan utamanya sebagai pedagang.

“gini ini kan ya baik to mbak, lihat saja...(sambil menunjuk pedagang) sumber maron jadi rame gini kan mereka bisa jualan. Lumayan buat nambah penghasilan. Biar cuma sekedar buka lapak gini, tapi kan ini lumayan mbak” (wawancara dengan Bapak Zainudin 23/05/2016)

Apabila berbicara mengenai dampak pariwisata tidak akan jauh dari pembahasan mengenai bagaimana pariwisata membawa dampak terutama pada persoalan mengenai pendapatan dan terbukanya kesempatan bekerja (Soekadijo, 1996:274). Seperti yang diutarakan oleh Bapak Zainudin yang menanggapi bahwa dengan berkembangnya Sumber Maron sebagai objek wisata membawa dampak positif khususnya pada sektor ekonomi, yakni dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meski banyak yang memberikan respon positif terhadap pengembangan Sumber Maron menjadi objek wisata, namun di sisi lain dengan keberadaan wisata bukan hanya memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Wisatawan juga dapat memberikan dampak negatif mengingat konsekuensi industri pariwisata membutuhkan sumber daya terutama alam dan manusia untuk dapat memberikan layanan yang memuaskan (Wisnawa dkk, 2014: 95). Pengembangan wisata Sumber Maron juga memberikan dampak negatif salah satunya saat penelitian berlangsung adalah keberlangsungan sarana air bersih sedikit terganggu.

Sarana yang berada di sekitar objek wisata berupa bak penenang, tandon, pipa pesat, turbin dan perangkat lainnya yang berhubungan dengan alat PLTMH. Setiap sarana yang ada memiliki kinerja tersendiri. Tanpa pandangan Sumber Maron kini sebagai objek wisata Bapak Zainudin hanya berpendapat:

“Iha kita ini gatau lho mbak kalau sumber maron ini jadi wisata, wong ini didesain bukan khusus untuk wisata. Tapi emang buat PLTMH sama sarana air bersih kan. Jadi ya mau bagaimana”
(wawancara dengan Bapak Zainudin 23/05/2016)

Keberadaan wisatawan secara tidak langsung mengganggu kinerja PLTMH. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sayyid, bahwa fungsi bak penenang itu adalah air yang dibendung untuk kemudian diteruskan menuju pipa pesat. Kemudian setelah masuk kepada pipa pesat, air diproses menuju turbin dan generator. Setelah itu turbin dapat menghasilkan listrik sehingga PLTMH dapat bekerja. Seharusnya keberadaan bak penenang tersebut berfungsi supaya menjaga air yang berada dalam bak tersebut stabil dan tenang untuk kemudian dapat diteruskan menuju turbin. Namun dengan keberadaan wisatawan yang berenang di dalam bak penenang

menyebabkan air bergelombang sehingga kapasitas turbin untuk memproses air tidak stabil.

“ibaratnya yo sampeyan bawa motor, antara jalan yang bagus dan jalan yang banyak batu batu jalan jelek lah. Sekarang logikanya kalau sampeyan naik motor di aspal yang jalannya bagus, kan enak itu naik motornya. Nah kalau sampeyan naik motor jalannya jelek? Ya kan motornya harus bekerja keras dua kali lipat itu. Mesinnya jadi gak stabil, ya lama lama kan jadi rusak. Ibaratnya ya sama itu mbak sama turbinnya itu. Coba kalo itu bak penenang kan fungsinya untuk menampung air supaya tenang pas masuk ke pipa sama turbinnya. Ya trus kalau wisatawan pada renang disitu semua, kan airnya itu gak stabil mbak. Yang datang air dan gelombang, jadi kinerja turbin tidak stabil” (wawancara dengan Bapak Sayyid 18/05/2016)

Gangguan yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan kemudian berdampak kepada keberlangsungan sarana air bersih, sehingga sewaktu melonjaknya jumlah wisatawan pada hari libur menyebabkan generator rusak dan aliran menuju tandon untuk mengairi rumah warga terhenti. Generator tersebut bahkan sampai terbakar dan kerusakan tersebut terjadi selama 4 hari berturut turut. Peristiwa ini terjadi ketika libur panjang pada saat tanggal 5 Mei silam. Kebetulan pada tanggal itu libur panjang mulai tanggal 5-8 Mei 2016. Biasanya kerusakan akan ditangani langsung oleh pihak BPSAB&S namun kendala yang terjadi adalah untuk membeli alat alat pengganti tidak bisa dilakukan karena hari libur panjang sedangkan toko penjual alat tersebut tutup pada hari libur.

“ya mau beli kan harus ke Surabaya mbak, ditambah lagi kan waktu itu libur panjang ya mau gak mau kan harus nunggu sampai hari senin baru dibetulkan. Masih mending kalau rusak pas liburan hari minggu gitu kan benerinnya gak usah nunggu sampai berhari hari. Lha kalau kayak kemarin itu, ya gimana kita bisa apa? Cuma bisa nunggu hari senin aja baru bisa berangkat ke Surabaya untuk beli peralatannya” (wawancara dengan Bapak Sayyid 18/05/2016)

Bukan hanya mengancam keberlangsungan sarana air bersih masyarakat, keberadaan sarana PLTMH juga mengancam berlangsungnya aktivitas wisata.

“disitu itu kan banyak rangkaian pipa mbak, pipa yang buat dinaikkan menuju tandon rumah warga. Ya ada muatan listriknya..coba sampeyan bayangin kalau misalnya pipanya jatuh nimpa wisatawan atau jatuh ke air. Air itu kan penghantar listrik yang cepat lho” (wawancara dengan Bapak Sayyid 18/05/2016)

Kerusakan generator menyebabkan air tidak mengalir kepada sambungan rumah yang ada di 4 desa. Meski ada beberapa yang menggunakan tandon pribadi, namun tidak jarang masyarakat kembali mengambil air dari sumber sedangkan sisanya hanya mengandalkan pergantian jadwal aliran air yang dilakukan oleh pihak BPSAB&S. Pergantian jadwal giliran aliran air menurut penjelasan Bapak Sayyid, Desa Karangsono mendapatkan giliran pukul 6 pagi sampai 6 sore, sedangkan selebihnya yakni 6 pagi sampai 6 sore adalah giliran luar Desa Karangsono. Solusi giliran air ini dilakukan untuk meminimalisir konflik masyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan air mereka.

Meski kerusakan yang terjadi juga tidak dapat dihindari serta keberadaan sarana PLTMH yang mengancam aktivitas wisata, begitu pula BPSAB&S yang berusaha untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Solusi permasalahan yang dilakukan oleh pihak BPSAB&S adalah dengan membuat tulisan batas renang yang diperbolehkan. Dalam hal ini pihak BPSAB&S bekerja sama dengan linmas sebagai pihak yang mengontrol aktivitas wisatawan. Jika wisatawan sudah melebihi batas renang tersebut, maka wisatawan akan diperingati untuk menjauh dari batas tersebut. Hal ini dilakukan supaya air yang menuju pipa pesat tetap tenang meskipun terdapat wisatawan berenang di sekitar bak.

Kemudian untuk solusi pembangkit listrik yang tidak dapat berfungsi sementara, pihak BPSAB&S masih berlangganan listrik ke PLN. Sehingga untuk sementara apabila terdapat kerusakan pada pembangkit listrik, maka otomatis akan dialihkan ke PLN. Apabila terjadi kerusakan seperti yang dijelaskan sebelumnya akan berlaku sistem giliran sambungan air yang berlaku setiap desa 12 jam dalam sehari. Terakhir adalah mengenai keberadaan sarana PLTMH yang mengancam aktivitas wisata, solusi yang sedang diupayakan pelaksanaannya adalah untuk membangun pagar di sekitar sarana perpipaan supaya tidak membahayakan wisatawan yang sedang berenang. Dengan begitu solusi dan penanganan yang dilakukan diharapkan Sumber Maron tetap terjaga bukan hanya objek wisatanya saja namun juga terjaga keberlangsungan lingkungannya.

4.6 Pengoptimalan Sumber Mata Air

Dalam sebuah perencanaan pembangunan, seringkali lingkungan adalah aspek yang sangat dirugikan. Sedangkan pemeliharaan dan keberlangsungan lingkungan merupakan aspek yang perlu diutamakan selain aspek yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali pembangunan yang sangat merugikan lingkungan salah satunya adalah alih fungsi lahan. Sedangkan akibat alih fungsi tersebut menyebabkan terancamnya kehidupan apabila kita melihatnya dari sisi ekologi. Interaksi antar organisme dari yang terkecil sampai berwujud manusia akhirnya terancam. Misalnya saja terancamnya kekeringan, eksploitasi sumber daya alam, kerentanan akan bencana, dan lain sebagainya. Sehingga dalam perencanaannya sendiri perlu adanya kajian mengenai pembangunan yang mempertimbangkan keserasian antara aspek khususnya ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini yang menjadi sorotan adalah lingkungan agar dapat

terjadinya keseimbangan ekologis demi kelangsungan hidup manusia (Abdurrahman, 2003: 3).

Pemanfaatan Sumber Maron dilakukan oleh masyarakat guna keberlangsungan hidup masyarakat Karangsono bersama dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Masyarakat berartispasi penuh dalam pengimplementasian program WSLIC-II yang secara tidak langsung mereka juga melakukan usaha dalam mengkonservasi lingkungan. Pengoptimalan Sumber Maron dilakukan untuk dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan air masyarakat Karangsono. Dalam konteks ini pengoptimalan dilakukan supaya potensi yang ada dapat digunakan bersama tanpa adanya kesenjangan. Gagasan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan usaha konservasi masyarakat Karangsono yang menyatakan bahwa dalam sebuah pembangunan harus memiliki tujuan ekologi yakni kelangsungan hidup secara keseluruhan dan kesehatan ekologi untuk menghindari bencana kerusakan ekosistem (Munasinghe, 2003: 9).

Tujuan konservasi sumber mata air ini semata mata untuk keberlangsungan lingkungan, bukan hanya melindungi sumber mata air namun juga mengoptimalkan sumber mata air agar masyarakat dapat terpenuhi akan kebutuhan air. Seperti yang dijelaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 mengenai tata pengaturan air yang menyebutkan bahwa segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat. Sehingga dalam praktiknya pengoptimalan Sumber Maron memiliki tujuan yang tepat guna. Dengan

adanya tata pengaturan air yang dilakukan oleh BPSAB&S sebagai badan yang mengelola dan mengawasi sehingga terwujudnya manfaat sebesar besarnya dalam memenuhi kesejahteraan hidup masyarakat.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan air karena potensi yang dimiliki oleh Sumber Maron cukup besar akhirnya potensi tersebut dikembangkan lagi menjadi sumber dari PLTMH. Pembangunan PLTMH selesai pada tahun 2012, mulai pada tahun tersebut kemudian muncul potensi wisata yang akhirnya pada saat ini Sumber

Maron berkembang menjadi objek wisata. Dalam paradigma pariwisata, industri pariwisata bersifat rentan dan perlu perhatian yang ekstra (Gunawan dkk, 2012: 2).

Sehingga pada praktiknya perlu adanya usaha dalam meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh pembangunan atau pengembangan pariwisata. Selain itu pula perlu adanya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata. Hal ini semata untuk meminimalisir dampak yang terjadi pada aspek yang rentan yakni sosial, ekonomi dan khususnya lingkungan. Namun, seringkali dampak negatif yang disebabkan oleh pengembangan tersebut diabaikan oleh pemerintah sehingga implementasi dari pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata bersifat kurang efektif.

“ini kan Sumber Maron jadi wisata gak ada peresmian mbak, rame rame sendiri. Kapan kae iku nduk? Kok aku lali (sambil berteriak kepada saudara sepupunya untuk bertanya) yo palingono 2012 opo 2013 ngono iku mbak. Saya taunya kan dari ya’ mad kok katanya mesinnya itu dalam satu bulan ini lho mbak sudah rusak 3 kali. Kobong jare.” (wawancara dengan Ibu Siti 17/05/2016)

“.....lho ya lek rusak ngono mati lah mbak air air disini itu. Gak bisa ngalir. Ya lek mati ya nang sumber maneh ngambil air hahaha” (wawancara dengan Ibu Siti 17/05/2016)

".....yo nek aku ngambil a mbak, gak nduwe tandon pribadi. Kalau sudah mati gitu ya ada yang ngambil air ke sumber maron apa sumber jeruk. Atau kalau punya tandon sendiri ya pake tandon. Kalau nggak ya kan ada sistem giliran gitu kan nanti dari wslic yang ngasih tau, biasanya karangsuko jatahnya dari jam 6 pagi sampai 6 malam. Sisanya luar desa." (wawancara dengan Ibu Siti 17/05/2016)

Seperti yang digambarkan oleh Ibu Siti mengenai permasalahan terhadap mesin menyebabkan terhentinya aliran air ke rumah. Tidak banyak yang memiliki tandon pribadi, sehingga beberapa masyarakat hanya mengandalkan jam giliran untuk tetap dapat mengakses air dari rumahnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Anik selaku konsumen rumah tangga.

".....oh enggak pernah mbak kalau sampai airnya habis gitu. Cuman pernah ya waktu itu airnya mati mbak, mesinnya itu mati. Ya semenjak rame rame ini mbak, ramenya kan baru sekitar 2 tahun belakangan ini. Gara gara wisatawan katanya. Gak paham saya. Pokoknya waktu itu mesinnya sampe meledak katanya." (wawancara dengan Ibu Anik 09/05/2016)

".....ya mati mbak waktu itu trus kalau mau dapat air ya berlaku jam giliran gitu. Nanti dikasih tau sama wslic kalau mesinnya mati. Jadi ya siap siap aja nampung air di bak kalau di rumah saya. Kan gak punya tandon." (wawancara dengan Ibu Anik 05/05/2016)

Berbeda dengan Bapak Dafik yang memiliki usaha batu bata di rumahnya. Dalam hal ini Bapak Dafik sangat membutuhkan air untuk kelangsungan usahanya tersebut, sehingga Bapak Dafik membangun tandon untuk mengantisipasi apabila aliran sumber maron tidak mengalir seperti kejadian pada awal bulan Mei silam akibat kerusakan pada mesin penggerak airnya.

"ya pake tandon mbak kalau saya. Ya memang ada jam giliran itu kalau pas mesinnya rusak, cuman kalau cara saya sih jadi airnya kan sudah saya tampung di tandon sebelumnya, jadi airnya kan masih ada kalau airnya gak ngalir soalnya saya kan ngambil dari tandon. Jadi pas airnya di tandon udah habis ya kan mesinnya udah dibetulkan sama wslic. Jadi insyaAllah saya gak bingung air. Apalagi kan saya usaha gini ya mbak hahaha." (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

Hal yang dikeluhkan juga bukan hanya sekedar kinerja mesin yang menurun sehingga terjadi kerusakan, namun sampah yang berserakan akibat aktivitas wisatawan juga tidak dapat ditanggulangi oleh masyarakat. Menurut pernyataan Bapak Dafik, dampak dari keberadaan wisata ini jelas merugikan lingkungan karena wisatawan seringkali membuang sampah sembarangan dan sampah tersebut bahkan mengalir sampai ke desa seberang yakni Brongkal.

“.....itu aja tuh sampahnya sampe ke desa istri saya itu, sampe ke Brongkal. Aduh sampahnya mbak dimana mana, dulu aja bersih kok. Sekarang itu kalen kalen isinya sampah tok. Sampah pop mie itu bungkusnya itu dimana mana. Lha iya gimana lho mbak wong di sumber maron aja gak ada tempat sampah. Malah itu ada tulisan apa itu, gak ada tong sampah kantongin aja hahaha. Yaopo seh iku sing nulis iku mikir opo, gak ada tong sampah kantongin aja.” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)



Gambar 18: Plang “G Ada Tempat Sampah Kantongin Aja!”

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar diatas adalah keadaan yang dideskripsikan oleh Bapak Dafik yang dalam hal ini sangat disayangkan oleh masyarakat sekitar juga. Sampah berserakan hingga mengalir ke desa seberang menyebabkan kerusakan pemandangan, bahkan lebih lanjut bukan hanya pemandangan yang semula sejuk dan asri tapi juga bisa

menyebabkan bau yang tidak sedap jika menumpuk lebih banyak. Bukan hanya Desa Brongkal saja yang berserakan sampah, bahkan di dalam sekitar area wisata juga terdapat sampah berserakan dan yang disayangkan tidak dibuang karena belum adanya tempat sampah yang ada di sekitar kawasan wisata.

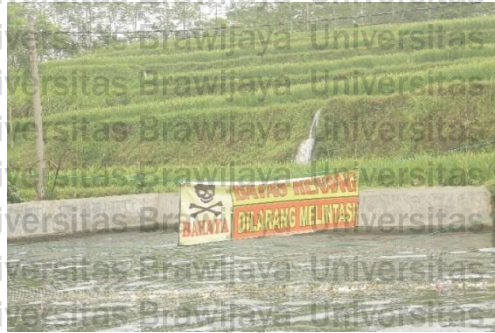


Gambar 19: Sampah di Kawasan Wisata Sumber Maron
Sumber: Dokumentasi Pribadi

“padahal yang diharapkan oleh warga itu kan kalau ada mahasiswa KKN disini lho mbak kayak sampeyan sampeyan yang dari universitas gitu kalau bisa ya...nyumbang sini buat bikin tempat sampah gitu mbak, soalnya belum ada kan di sumber maron itu.” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

“ya memang ada beberapa tempat sampah, tapi itu juga cuma di atas. Dekat bagian jaga tiket itu. Tapi kan sekitar air itu nggak ada tempat sampah. Ya masa sih dikantongin gitu aja hahaha gak enthos” (wawancara dengan Bapak Dafik 28/05/2016)

Beberapa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat berbeda begitu pula dengan cara mereka menangani permasalahan mereka juga berbeda beda. Meskipun begitu yayasan BPSAB&S menanggapi untuk meminimalisir kerusakan akibat aktivitas wisatawan tidak dapat berbuat banyak. Usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kerusakan mesin supaya kinerjanya tetap terjaga adalah dengan membatasi aktivitas wisatawan yang sedang berenang di sekitar bak penenang.



Gambar 20: Pembatas Renang Wisatawan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Zainudin

“nah....ini kan saya mbak yang masang pembatas buat jangan berenang dekat dekat sini. Ya biar aja wisatawan renang di sebelah sana (sambil menunjuk) tapi jangan sampai sini, biar air ini tenang sedikit lah. Trus kalau misalnya ada gitu wisatawan yang renang sampai batas sini nanti yang ngasih tau dari linmasnya mbak, penjaga ya kayak satpam desa gitu lho mbak. Nah nanti dia yang ngasih tau kalau batas renangnya Cuma sampai situ aja gak boleh lebih. Tapi ya aduh kalau pas liburan gitu mbak, udah gak bisa dikasih tau wisatawannya. Soalnya saking rame jadi ya berenang renang sampe kesini sini wes”
(wawancara dengan Bapak Zainudin 23/05/2016)

Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada pariwisata lebih menekankan pada pengembangan pariwisata yang mengelola sumber daya alam dan manusia dalam jangka panjang dibandingkan dengan kontribusi yang diperoleh melalui aktivitas pariwisata (Sharpley, 2000: 10). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh pengembangan pariwisata.

Dengan begitu perlu adanya analisis lebih lanjut untuk meminimalisir kerusakan mesin yang berujung kepada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat Karangsono. Meskipun sudah dilakukan beberapa usaha untuk meminimalisir permasalahan sementara terkait dengan mesin, namun analisis permasalahan lebih lanjut diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Jadi bukan hanya solusi yang bersifat sementara, namun kebutuhan untuk generasi mendatang juga

perlu dipertimbangkan (*World Commission on Environment and Development*, 1988: 59).

4.7 Refleksi Pelaksanaan Program WSLIC-II

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara singkat program WSLIC-II adalah program yang bergerak dalam menunjang sarana air bersih dan sanitasi. Kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam mengakses air bersih dan minim akan sarana sanitasi (PAMSIMAS, 2014: 9).

WSLIC-II merupakan salah satu dari beberapa program pemerintah yang juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan dan untuk mewujudkannya program ini dilakukan di beberapa wilayah dengan orientasi pedesaan di Indonesia. Pemilihan daerah ini berdasarkan beberapa kriteria, menurut data LP3ES tahun 2007 kriterianya antara lain yakni indeks kemiskinan dengan bobot 30, cakupan layanan air bersih dengan bobot 30, cakupan layanan sanitasi dengan bobot 10, jumlah penduduk desa dengan bobot 10, dan yang terakhir kasus penyakit diare dengan bobot 20 poin (LP3ES, 2007: 6). Selain kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertimbangan lainnya yakni terdapat potensi sumber daya air yang dapat diberdayakan dan tidak adanya proyek sejenisnya dalam kurun waktu 2 tahun belakang serta kesanggupan masyarakat untuk ikut berkontribusi (LP3ES, 2007: 6).

Terkait dengan kontribusi masyarakat, masyarakat Karangsono tidak hanya mengandalkan uang yang diberikan oleh pemerintah saja. Sebelumnya dijelaskan oleh Bapak Taufik, bahwa dana yang digelontorkan oleh Dinas Kesehatan yakni sebesar Rp. 200.000.000,-. Meskipun Desa Karangsono sudah masuk dalam kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk memberikan dana tersebut masyarakat

juga perlu berpartisipasi. Sebagai bentuk partisipasinya dalam program WSLIC-II masyarakat ikut berkontribusi melalui dana *incash* dan *inkind*. Menurut penjelasan Bapak Taufik terkait dengan dana *incash* dan *inkind* yakni:

“sebenarnya dana 200juta itu belum cukup. Harus ada kontribusi dari masyarakat yang nilai rupiahnya mungkin sekitar 50juta. Jadi totalnya itu keseluruhannya 250juta. Cuma yang 50juta ini perlu digaris bawahi, satunya berupa incash. Incash itu iuran. Jadi pada waktu itu incash itu ada 3 opsi, 25ribu, 50ribu, 75ribu. Jadi masyarakat disuruh milih, ya sumbangan gitu lah. Dan alhamdulillah dalam satu tahun terkumpul itu sudah berupa uang. Nah itu kan separonya berupa uang, dan separonya lagi itu berupa inkind. Inkind itu istilahnya tenaga kerja. Jadi orang yang gak membayar incash, diharapkan membayar tenaga kerjanya. Yo iku sing mbangun mbangun paralon nang omah omah. Jadi ada yang nggali paralon 1 meter, 2 meter, pokok kalau bagi orang yang gak bisa nyumbang incash opo inkind ya diminta ngirimi nasi buat bantu bantu yang bangun paralon.”
(wawancara dengan Bapak Taufik 28/05/2016)

Kontribusi ini ditujukan supaya masyarakat tidak terlalu bergantung kepada bantuan dana yang berasal pemerintah sehingga masyarakat saling bahu membahu untuk menyukseskan program WSLIC demi kepentingan masyarakat bersama.

Kontribusi tersebut bukan hanya dalam bentuk materi, namun juga kontribusi tenaga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik terkait dengan sumbangan *incash* dan *inkind*.

Sebagai organisasi desa yang mengkoordinator masyarakat, TKM juga melakukan serangkaian sosialisasi terkait dengan program WSLIC. Hal ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka paham dengan program WSLIC, dengan harapan bukan hanya sebagai program yang berhenti pada tahap perencanaan namun juga dapat sukses dan berlanjut hingga masa yang akan datang. Tentunya sosialisasi ini mengarah kepada tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat

berpartisipasi untuk menyukseskan program ini. Sosialisasi ini diharapkan dapat pula merubah pola pikir masyarakat terhadap lingkungan sehat.

Terkait dengan biaya dan pemasangan, semua dilakukan sesuai dengan persetujuan masyarakat. Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada keberlanjutan program semuanya bersifat terbuka. Salah satunya perlakuan pada masyarakat yang masih menggunakan sumur meskipun sudah berjalan program WSLIC. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Nur sebagai pemilik sumur dalam rumahnya:

“udah dari dulu mbak ini saya masih pake sumur. Tapi tahun berapa ya saya lupa. soalnya kan ini rumahnya mertua a mbak hehehe. Kae ditawarne ampra wslic mbak pas sosialisasi kae, tapi gak wes eman soal e nek sumur e gak digawe hehehe. Wong ya ra dipekso kok, sukarela nek pengen ya ampra ngono loh mbak” (Wawancara dengan Ibu Nur 22/05/2016)

Apabila masyarakat yang ingin melakukan pemasangan atau seringkali masyarakat menyebutnya *ampra air*, pihak pengelola memiliki tarif yang berbeda antara konsumen Desa Karangsuiko dan konsumen yang rumahnya berada di luar desa. Pada 2 tahun awal beroperasi biaya yang dikeluarkan konsumen dalam desa untuk melakukan *ampra* sebesar Rp. 450.000,- sedangkan konsumen yang berada di luar desa sebesar Rp. 1.000.000,-. Hal ini serupa dengan penelitian milik Sita (2011) terkait dengan persoalan ketersediaan konsumen dalam pembayaran yang ditetapkan oleh pihak pengelola yang cenderung tidak memaksa dan harga tepat sasaran. Sita (2011) juga memaparkan bentuk dukungan yang ditunjukkan oleh masyarakat yakni berupa kesanggupan masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya pemasangan dan iuran rutin. Sehingga keberadaan program WSLIC dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena bantuannya yang bersifat efektif dan tepat sasaran.

Meskipun secara keseluruhan program WSLIC masih belum meningkatkan angka derajat kesehatan dan penyediaan sarana sanitasi layak senilai 100%, namun program ini sudah cukup ternilai sukses dibuktikan dengan beberapa hasil evaluasi yang dinilai positif. Salah satunya adalah laporan LP3ES (2007) yang melakukan evaluasi di tiga daerah berbeda yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat dengan konsentrasi di enam desa berbeda. Evaluasi dinilai berdasarkan beberapa gambaran umum meliputi; letak lokasi, komposisi kesejahteraan, tahun dibangun, sistem air bersih, sumber air, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan jumlah jamban yang dibangun (LP3ES, 2007: 24).

Selain itu pula keberhasilan program WSLIC diukur dalam cara yang berbeda dan secara ringkas terdapat lima tolak ukur yakni; kesesuaian antara tujuan dan hasil dari proyek, ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi, penurunan penyakit yang disebabkan oleh air dan sanitasi/lingkungan yang kurang baik, terjadinya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudahan dalam mencapai akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi (LP3ES, 2007: 27).

Indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya terlihat berhasil diterapkan pada Desa Karangsono. Secara sederhana program WSLIC dikenal luas oleh masyarakat sebagai penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, dalam bab sebelumnya sudah dipaparkan mengenai keadaan masyarakat yang saat ini mudah dalam mengakses air bersih dan dirasakan oleh masyarakat bahwa pola hidup bersih dan sehat mulai berubah. Kebiasaan terkait dengan buang air besar di tempat terbuka dan konsumsi air yang tidak layak kini berangsur berkurang.

Bukan hanya WSLIC sebagai program yang bergerak pada penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, negara Indonesia secara luas masih terdapat banyak sekali program serupa yang bergerak pada penyediaan air bersih dan sanitasi. Hal ini dilatar belakangi oleh pencapaian tujuan yang sudah ditargetkan dalam MDGs (*Millenium Development Goals*). Program seperti PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pro-Air (Program yang bekerja sama dengan Negara Jerman), WASPOLA (*Water and Sanitation Policy Action Planning*), CWSHP (*Community Water Service and Health Project*), dan Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama dengan WSLIC yakni sebagai program yang membantu masyarakat perihal penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.

Dari penjelasan secara keseluruhan, dapat direfleksikan melalui program WSLIC dan program serupa lainnya bahwa saat ini pemerintah sedang mengusahakan bantuan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berawal mula dari perencanaan kebijakan yang saat ini bersifat *bottom-up* yang dinilai efektif dibandingkan *top-downn*. Perencanaan kebijakan *bottom-up* menyatukan keseluruhan elemen baik itu pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama. Keberhasilan program bukan hanya berasal dari dukungan pemerintah berupa dana, namun juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan hingga keberlangsungan program tersebut (PAMSIMAS, 2014: 41). Hasil nyata yang berasal dari pendekatan yang bersifat pasrtisipatif terlihat cukup maksimal, hal ini dibuktikan dengan keberlangsungan program WSLIC di Desa Karangsuiko yang sampai pada saat ini masih terus berjalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Air merupakan kebutuhan pokok, setidaknya hal ini juga terjadi pada masyarakat Karangsono yang membutuhkan air untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Akses masyarakat terhadap air bersih terbilang sulit, meskipun banyak sumber air yang ada namun masyarakat masih belum dapat mengoptimalkan sumber daya sekitar mereka. Masyarakat kemudian memilih untuk mengkonsumsi air irigasi sungai untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada akhirnya pemerintah yang melihat kondisi ini memberikan bantuan yang terwujud dalam program WSLIC-II pada tahun 2005. Program WSLIC-II adalah program yang berkonsentrasi pada pembangunan sarana sanitasi dan air bersih. Masyarakat mulai membangun sarana seperti jaringan pipa yang digunakan untuk sambungan rumah di seluruh Desa Karangsono. Dalam konteks ini, Sumber Maron adalah sumber daya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air. Setelah selesai program WSLIC-II kemudian masyarakat melegalkan yayasan BPSAB&S guna menjaga sarana dan prasarana yang ada. Dengan begini masyarakat Karangsono dapat terpenuhi kebutuhan mereka terhadap air bersih.

Setelah berhasil dengan menangani permasalahan krisis air bersih pada masyarakat Karangsono, kemudian BPSAB&S mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Sumber Maron untuk menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dengan keberadaan PLTMH ini ternyata menjadi potensi tersendiri pada sektor pariwisata yang kemudian secara bersamaan, pada tahun 2012 PLTMH dan wisata Sumber Maron berkembang. Selain sebagai sarana

pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Sumber Maron juga menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat pada sektor pariwisata.

Meskipun dengan perkembangan Sumber Maron membawa dampak positif pada aspek ekonomi, namun di sisi lain masyarakat merasakan dampak negatif terkait dengan persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Aktivitas wisatawan Sumber Maron secara tidak langsung mengganggu kinerja mesin PLTMH sehingga menyebabkan kerusakan mesin. Apabila mesin rusak, maka akses masyarakat terhadap air bersih akan terganggu. Bukan hanya mengganggu kinerja mesin saja tetapi kondisi lingkungan yang menjadi kotor akibat sampah yang berserakan juga membuat lingkungan di sekitar Sumber Maron tampak tidak terawat.

5.2 Saran

Dalam konsep pembangunan yang baik adalah dengan dipertimbangkannya aspek lingkungan sebagai aspek utama. Pada praktiknya pengembangan pariwisata Sumber Maron menyebabkan beberapa dampak negatif yang dirasa masyarakat merugikan. Salah satunya adalah sampah yang berserakan sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang sedap. Alangkah baiknya pemerintah desa menyediakan tempat sampah yang diletakkan di setiap tempat supaya wisatawan mudah mengaksesnya. Bukan hanya keberadaan tempat sampah saja yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi visual Sumber Maron, untuk meminimalisir kerusakan mesin mungkin perlu adanya penetapan zona wisata sebelum adanya perubahan alih fungsi secara keseluruhan. Meskipun upaya yang dilakukan BPSAB&S dalam meminimalisir kerusakan meskipun masih minim, namun sudah baik. Jadi

keberlanjutan program diharapkan dapat diteruskan sampai generasi mendatang sehingga masyarakat Karangsono tidak perlu khawatir akan krisis air.

Penelitian selanjutnya dalam hal ini untuk memperkaya kajian Antropologi khususnya pada aspek ekologi. Bahwa studi ekologi bukan hanya berbicara mengenai interaksi antar organisme namun juga ekologi membahas mengenai keberlanjutan. Selanjutnya diharapkan dapat mengkaji Sumber Maron pada aspek budaya dan folklor, seperti cerita masyarakat Karangsono dan Sumber Maron yang saat ini sudah mulai hilang karena tidak adanya regenerasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2003. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar
- Anonim. 2000. *Agenda 21 Sektor*. Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan. Jakarta: Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP
- Anonim. 2007. *Kajian Cepat Terhadap Program-Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia: Program WSLIC-2 dan PAMSIMAS*. Jakarta: LP3ES
- Chaerunnissa, Chika. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes*. *Politika Jurnal Ilmu Politik* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2014
- Darowski, Lukasz et all. 2006. *Negative Impact of Tourism on Hawaii Natives and Environment*. *Lethbridge Undergraduate Research Journal* Volume 1 Number 2
- Djunaedi, Achmad. 2000. *Unsur-Unsur Proposal Penelitian*. Diktat Perkuliahan Metodologi Penelitian Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Emilia, Fransisca. 2013. *Tesis. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi DAS (Studi Kasus Masyarakat Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang)*. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro
- Gunawan, Myra dkk. 2012. *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization
- Harris, Jonathan M. 2000. *Basic Principles of Sustainable Development*. Global Development and Environment Institute Working Paper Tufts University : USA
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humnika
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional Bab II Pasal 2
- Irfan, Muhammad dkk. 2015. *Penerapan Teknologi Pengoperasian, Perawatan, dan Pelatihan Mikro Hidro di Desa Karanguko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang*. *Jurnal Dedikasi* Volume 12 Halaman 39-42
- Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Sekolah Pascasarjana: Institut Pertanian Bogor
- Kattel, Shambu Prasad. 2005. *Sustainability or Sustainable Development: an Anthropological Perspective*. *Occasional Papers in Sociology and Anthropology* Vol. 9 2005 p. 258-277
- Kottak, Conrad P. 2006. *The New Ecological Anthropology*. *Jurnal of The Environment in Anthropology: a Reader in Ecology, Culture and Sustainable Living* New York University Press

Kuntjara, Esther. 2006. *Penelitian Kebudayaan: Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Maslow, Abraham. 1970. *Motivation and Personality*. New York: Harper&Row Publisher

Matsuoka, Jon et all. 2015. *The Environmental, Economic, and Social Impacts of Resort Development and Tourism on Native Hawaiians*. The Journal of Sociology & Social Welfare Vol. 15 February 2015

Miles, Matther B. Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

Mokhtar A. dkk. 2013. Penerapan Teknologi Pengoperasian, Perawatan dan Pelatihan Mikro Hidro di Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Universitas Muhammadiyah Malang: Jurnal Dedikasi Volume 10 Bulan Mei 2013 Hal. 07-12

Munasinghe, Mohan. 2003. *Analysing The Nexus Of Sustainable Development And Climate Change: An Overview*. Sri Lanka: Munasinghe Institute for Development

Nurhidayati, Sri Endah. 2007. *Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. Universitas Airlangga : Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Hal. 191-202.

Pamsimas. 2014. *Pamsimas: Menjawab Tantangan Air Minum dan Sanitasi di Wilayah Perdesaan Indonesia*. Jakarta: Publikasi Bank Dunia

Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

Pitana, Prof. Dr. I Gede M. Sc dan Ir. Putu G. Gayatri M. Si. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Andi

Prabatmodjo, Hastu. 2006. *Wilayah Perdesaan Berkelanjutan: Suatu Eksplorasi Teoritis*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 17 No 3 Bulan Desember 2006 hal 1-11

Pranata, Utama. 2012. Tesis. *Analisis Keberlangsungan Pengelolaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (Pasca WSLIC-II) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangsono - Kabupaten Malang Tahun 2012*. Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat

Rabbany, Md Ghulam et all. 2013. *Environmental Effects of Tourism*. American Journal of Environment Energy and Power Research Vol 1 No 7 September 2013

Rahmawati. 2007. Tesis. *Pemanfaatan Kawasan Sumber Mata Air Senjoyo dalam Pengembangan Wilayah di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

Ratman, Dadang Rizki SH. MPA. 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019*. Materi Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata

tentang Akselerasi Pembangunan Kepariwisata dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 Buku I & II

Richter, Brian D. et all. 2003. *Ecologically Sustainable Water Management: Managing River Flows for Ecological Integrity*. Ecological Applications Vol. 13 No. 1 p.206-224

Roucek, Joseph S. dan Warren, Rolland L. 1984. Pengantar Sosiologi. Jakarta: PT Bina Aksara

Serageldin, Ismail. 1996. *Surviving Scarcity: Sustainable Management of Water Resources*. Harvard International Review Vol. 18 No. 3 p. 50-53

Sharpley, Richard. 2000. *Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide*. Journal of Sustainable Tourism, Vol.8 Hal: 1-19

Sita, Rai dan Ivanovich Agusta. 2011. Evaluasi Efektivitas, Relevansi, dan Keberlanjutan Dampak Proyek *Second Water Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC-2). Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Agustus 2011 Hal. 217-230

Soekadijo, R.G. 1997. Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"). Jakarta: PT Gramedia

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Method*). Bandung: Alfabeta

Suraya, Mila. 2014. Skripsi. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pada BPSAB&S Sumber Maron Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Sustaining Partnership. 2011. Ironi Air di Indonesia, Menyikapi Potensi Perang Air dan Belajar Tentang Air dari Swedia. Jakarta: Irsdp Bappenas

Suyanto, Bagong dan Sutinah. (ed.). 2007. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana

Undang Undang nomor 10 tahun 2009 Bab II Pasal 4 dan Bab III Pasal 5

Undang Undang nomor 50 tahun 2011 Bagian VI Pasal 29 Poin 3a

Usnaini, Husman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara

Utina, Ramli dan Dewi Wahyuni Baderan. 2009. Ekologi dan Lingkungan Hidup. Gorontalo: UNG Press

Wahab, Salah. 1992. Manajemen Kepariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita

Wisnawa, I Made Bayu dkk. 2014. Konflik Air Bersih Sebagai Akibat Pengembangan Sarana Pariwisata Pada Kawasan Bali Selatan Dilihat Dari Perspektif Perundang-undangan. Jurnal Perhotelan dan Pariwisata vol.4 nomor 1 hal. 95-110

World Commission on Environment and Development. 1988. Hari Depan Kita Bersama. Jakarta : PT. Gramedia

Online

<http://artipkarangsuko.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 27 juli 2016 pukul 11:32

<http://ilovemlg.com/berita/7-wisata-sumber-mata-air-yang-wajib-di-kunjungi-di-malang/> diakses pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 12.17

<http://www.gdrc.org/uem/water/dublin-statement.html> diakses pada tanggal 7 agustus 2016 pukul 12:42

Kiswara, Brama Yoga. 2015. Eddy Rumpoko: Potensi Kabupaten Malang Sangat Besar.http://www.beritajatim.com/politik_pemerintahan/236556/eddy_rumpoko_potensi_kabupaten_malang_sangat_besar.html diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 21.43

Martias, Irsyad. 2014. Menyoal Kelangkaan Air di Gunung Kidul.
<http://etnohistori.org/menyoal-kelangkaan-air-di-gunungkidul-oleh-irsyad-martias.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11.26

Naiobe, Yosef. 2014. Malang Raya Ditarget Jadi Destinasi Wisata.
<http://nasional.sindonews.com/read/925765/149/malang-raya-ditarget-jadi-destinasi-wisata-1416292585> diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pukul 1:23

The Millenium Development Goals Report 2015 download melalui
[http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20\(July%201\).pdf](http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf) diakses pada tanggal 02 juli 2016 pukul 01.30

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



LAMPIRAN I. BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Alfiana Dwi Cahyani
2. NIM : 125110802111001
3. Program Studi : S1 Antropologi
4. Topik Skripsi : Ekologi
5. Judul Skripsi : Pengelolaan Sumber Maron sebagai Pemenuhan Kebutuhan Air Domestik serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Karangnuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang
6. Tanggal Mengajukan : 01 November 2016
7. Tanggal Selesai Revisi : 18 November 2016
8. Nama Pembimbing : Irsyad Martias, M. A
9. Keterangan Konsultasi :

No.	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1.	19/10/2015	Pengajuan judul skripsi	Irsyad Martias, M. A	
2.	28/10/2015	Persetujuan judul skripsi	Irsyad Martias, M. A	
3.	11/11/2015	Perencanaan penelitian	Irsyad Martias, M. A	
4.	18/11/2015	Observasi tahap pertama	Irsyad Martias, M. A	
5.	16/12/2015	Pengajuan latar belakang	Irsyad Martias, M. A	
6.	06/01/2016	Pengajuan latar belakang	Irsyad Martias, M. A	
7.	21/01/2016	Pengajuan kajian pustaka	Irsyad Martias, M. A	
8.	26/01/2016	Pengajuan latar belakang	Irsyad Martias, M. A	
9.	01/02/2016	Pengajuan kajian pustaka, teori, dan metode penelitian	Irsyad Martias, M. A	
10.	08/02/2016	Pengajuan kajian teori dan metode penelitian	Irsyad Martias, M. A	
11.	17/02/2016	Revisi BAB I	Irsyad Martias, M. A	
12.	19/02/2016	ACC BAB I	Irsyad Martias, M. A	
13.	26/02/2016	Seminar Proposal	Irsyad Martias, M. A Manggala Ismanto, M. A	
14.	18/04/2016	Pemenuhan administrasi penelitian	Irsyad Martias, M. A	
15.	09/05/2016	Pengajuan surat izin penelitian	Irsyad Martias, M. A	

16.	Mei-Juni 2016	Penelitian lapangan	Irsyad Martias, M. A	
17.	22/06/2016	Pengajuan BAB II	Irsyad Martias, M. A	
18.	08/07/2016	Pengajuan BAB III	Irsyad Martias, M. A	
19.	13/07/2016	Revisi BAB III	Irsyad Martias, M. A	
20.	22/07/2016	Pengajuan BAB III & BAB IV	Irsyad Martias, M. A	
21.	27/07/2016	Revisi BAB IV	Irsyad Martias, M. A	
22.	12/08/2016	Revisi BAB IV dan pengajuan BAB V	Irsyad Martias, M. A	
23.	16/08/2016	Pengajuan BAB III dan IV	Irsyad Martias, M. A	
24.	19/08/2016	Revisi BAB I dan pengajuan BAB II	Irsyad Martias, M. A	
25.	23/08/2016	Pengajuan BAB I	Irsyad Martias, M. A	
26.	02/09/2016	Revisi BAB I dan pengajuan BAB V	Irsyad Martias, M. A	
28.	13/09/2016	Pengajuan BAB I, II, III, IV, dan V	Irsyad Martias, M. A	
29.	23/09/2016	ACC Seminar Hasil	Irsyad Martias, M. A	
30.	05/10/2016	Seminar Hasil	Irsyad Martias, M. A Manggala Ismanto, M. A	
31.	07/10/2016	Revisi Seminar Hasil	Irsyad Martias, M. A	
32.	11/10/2016	Revisi Seminar Hasil dan ACC Ujian Skripsi	Manggala Ismanto, M. A	
33.	26/10/2016	Ujian Skripsi	Irsyad Martias, M. A Manggala Ismanto, M. A	
35.	18/11/2016	Revisi Akhir	Irsyad Martias, M. A	

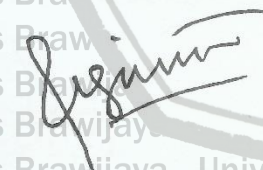
10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai:

A

Malang, 18 November 2016

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi

Dosen Pembimbing I




Dr. Hipolitus K. Kewuel, M. Hum
NIP. 19670803 20011112 1 001

Irsyad Martias, M. A
NIK. 201607 840709 1001



Untuk Mahasiswa
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib_ub.ac.id

**BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Jumat, 26 Februari 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : Alfiana Dwi Cahyani
NIM : 125110802111001
Prodi : Antropologi

Dengan judul:

Dampak Pengembangan Wisata Sumber Maron Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Edlin Dahniar Al-Fath, M.A.
2. Pembimbing II : _____
3. Peserta umum sejumlah : orang (terlampir)

Pembimbing I

(Edlin Dahniar Al-Fath, M.A.)
NIP. 870421 12 3 2 0051

Malang, 26 Februari 2016
Pembimbing II

(_____)
NIP. _____

Pembantu Dekan I,

Syaiful Muttaqin, M.A.
NIP. 1975 101 200312 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
 Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822
 E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fibub.ac.id

Untuk Mahasiswa

**BERITA ACARA
 SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada

Hari, tanggal: Rabu, 5 Oktober 2016
 Untuk mahasiswa :

Nama : Alfiana Dwi Cahyani
 N.I.M : 125110802111001
 Prodi : Antropologi

Dengan judul:

Dampak Pengembangan Wisata Sumber Maron Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Irsyad Martias, M. A
2. Pembimbing II
3. Penguji : Manggala Ismanto, M. A
4. Peserta umum sejumlah : orang (terlampir)



Malang, 05 October 2016
 Pembimbing I

Pembimbing I

Irsyad Martias

(Irsyad Martias, M. A)
 NIP. 201607 840709 1001

()
 NIP.

Pembantu Dekan I,



Syarif Muttakin
 Syarif Muttakin, M.A.
 NIP. 19751101 200312 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail: lib@ub.ac.id - <http://www.lib.ub.ac.id>

Malang, 26 MAY 2016

Nomor : 01 /UN10.12/AK/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Jalan Nasional Karangsono Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Malang, Jawa Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

Nama : Alfiana Dwi C
NIM : 125110802114001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung
berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

"DAMPAK PENGEMBANGAN WISATA SUMBER MARON TERHADAP PEMENUHAN
KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG"

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan
hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.

Dekan,



Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65143, Indonesia, Telp. +62341-575875, Fax. +62341-575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib_ub.ac.id

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Dwi C
NIM : 125110802111001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi Program S1 saya yang berjudul:

"DAMPAK PENGEMBANGAN WISATA SUMBER MARON TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG"

akan menjaga kerahasiaan data yang saya peroleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya akan etika penelitian yang berlaku.

Tanggal pernyataan: 16 Maret 2016

Yang membuat pernyataan;



Alfiana Dwi C
125110802111001

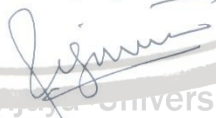
Mengetahui:

Dekan



Prof. Dr. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

Ketua Program Studi
S1 Antropologi



Dr. Hipolitus K. Kewuel
NIP. 19670803 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KH. Agus Salim No. 111, P. 05411366260 Fax. (0541) 366260

MALANG-65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 071/097/35.07.2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Mentauk : Surat Dari Dekan FIB UB Malang nomor 0643/UN10.12/AK/2016

Tanggal: 27 April 2016, Penerimaan Penelitian

Dengan ini Kami ~~TIDAK~~ **TIDAK** ~~KEBERATAN~~ melaksanakan kegiatan ijin Penelitian oleh

Nama/Instansi : Miriana Dwi C / Mhs. FIB UB Malang

Alamat : Jalan Veteran Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Dampak Pengembangan Wisata Sumber Maron Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Daerah/tempat kegiatan : Desa Karangsono Kec. Pagelaran Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Menaatl Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harus segera melapor ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Tembusan :
Yth.

1. Sdr. Dekan FIB UB Malang
2. Sdr. Camat pagelaran Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Desa Karangsono Kec. Pagelaran Kab. Malang
4. Sdr. Mhs/Ybs
5. Arsip

April 2016

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Ideologi HAM dan Wasbang

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kabid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO

Penata

NIP. 19680125 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PAGELARAN
KECAMATAN PAGELARAN
DESA KARANGSUKO

Jln. KH. SYUHUD ZAYYADI No. 61 (0341) 874591 8365174
Email : pemdeskarangsuko@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471.1 / 290 / 35.07.33.2009 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang ;

Nama : **ALFIANA DWI CAHYANI**
NIM : 125110802111001
Program Studi : Antropologi

Benar-benar melakukan penelitian mulai tanggal 9 Mei s/d 2 Juni 2016 di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang untuk menyusun Skripsi dengan Judul **Dampak Pengembangan Wisata Sumber Maron Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangsuko, 2 Juni 2016

